



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI
Jl. H. Djaini, RT.007/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116

Provinsi
Jakarta

Provinsi
Jawa Barat



RENSTRA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2025-2029

Kabupaten
Bogor



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini merupakan acuan untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pengendalian program dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasikan gerak dan langkah seluruh jajaran dan staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hingga ke tingkat lapangan. Semoga dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami ucapkan semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridhoNya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama. Amin.

Bekasi, 25 Agustus 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Widayat Subroto Hardi, S.T., M.T., M.T.
Pembina TK. I/IV b
NIP. 197503202002121006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-7
1.3.1 Maksud.....	1-7
1.3.2 Tujuan.....	1-7
1.4 Sistematika Penulisan	1-7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	2-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	2-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-8
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	2-8
2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana/Data Aset Perangkat Daerah.....	2-9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-12
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	2-43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	2-43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	2-43
2.2.2 Isu Strategis	2-45
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasarana Renstra Disperkintan Tahun 2025-2029.....	3-1
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.....	3-9
3.3 Arah Kebijakan.....	3-10
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
4.1 Program DISPERKIMTAN Tahun 2025-2029	4-1
4.1.1 Uraian Program dan Kegiatan	4-5
4.1.2 Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	4-8
4.2 Program Prioritas DISPERKIMTAN	4-55
4.2.1 Program Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	4-58
4.2.2 Sub Kegiatan Yang Medukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	4-59
4.3 Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian JABAR ISTIMEWA.....	4-60



4.4	Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian ASTA CITA	4-63
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	4-63
4.6	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)	4-66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-8
Tabel 2.2	Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-8
Tabel 2.3	Data ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	2-9
Tabel 2.4	Data Aset Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran	2-9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-40
Tabel 2.6	Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi	2-47
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-6
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-7
Tabel 3.3	Peta Jalan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3-9
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3-11
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	4-9
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	4-22
Tabel 4.3	Program/ Prioritas dan Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-56
Tabel 4.4	Program/Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.....	4-58
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.....	4-59
Tabel 4.6	Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian JABAR Istimewa.....	4-62
Tabel 4.7	Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian Asta Cita	4-64
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-65
Tabel 4.9	IKD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.....	4-67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah.....	1-1
Gambar 1.2	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	2-7
Gambar 2.2	Grafik Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	2-13
Gambar 2.3	Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	2-14
Gambar 2.4	Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat.....	2-15
Gambar 2.5	Grafik Optimalisasi Disiplin Aparatur.....	2-15
Gambar 2.6	Grafik Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-16
Gambar 2.7	Grafik Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	2-17
Gambar 2.8	Grafik Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2-17
Gambar 2.9	Grafik Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.....	2-18
Gambar 2.10	Grafik Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	2-19
Gambar 2.11	Grafik Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran.....	2-20
Gambar 2.12	Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Layak.....	2-21
Gambar 2.13	Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Aman	2-21
Gambar 2.14	Grafik Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau.....	2-22
Gambar 2.15	Grafik Persentase Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kota.....	2-23
Gambar 2.16	Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Yang Diremajakan/Dipugar di Kawasan Perkotaan.....	2-24
Gambar 2.17	Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	2-25
Gambar 2.18	Grafik Persentase Terasfasilitasinya Konflik Perkara Pertanahan Milik Pemkot.....	2-25
Gambar 2.19	Grafik Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah	2-26
Gambar 2.20	Grafik Presentase Penduduk Berakses Air Minum	2-27
Gambar 2.21	Grafik Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	2-28
Gambar 2.22	Grafik Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum.....	2-29
Gambar 2.23	Grafik Persentase Keretsediaan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi.....	2-30
Gambar 2.24	Grafik Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas Baik	2-31
Gambar 2.25	Grafik Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik	2-32
Gambar 2.26	Grafik Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik.....	2-33
Gambar 2.27	Grafik Persentase Bangunan SMPN Disetiap Kelurahan Dalam Kondisi Baik	2-34
Gambar 2.28	Grafik Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kondisi Baik.....	2-35
Gambar 2.29	Grafik Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualisa Baik	2-36
Gambar 2.30	Grafik Persentase GEduG Kesehatan Yang Berkualitas Baik	2-37
Gambar 2.31	Grafik Persentase Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obstertu Neonatal Emergency Dasar (Poned).....	2-38



Gambar 2.32	Grafik Persentase Ketersediaan Gedung RS Tipe D Tahun 2024 Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	2-39
Gambar 3.1	Hubungan Tujuan, Sasaran, Outcome RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	3-1
Gambar 3.2	Tujuan dan Sasarana Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	3-4
Gambar 4.1	Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	4-2

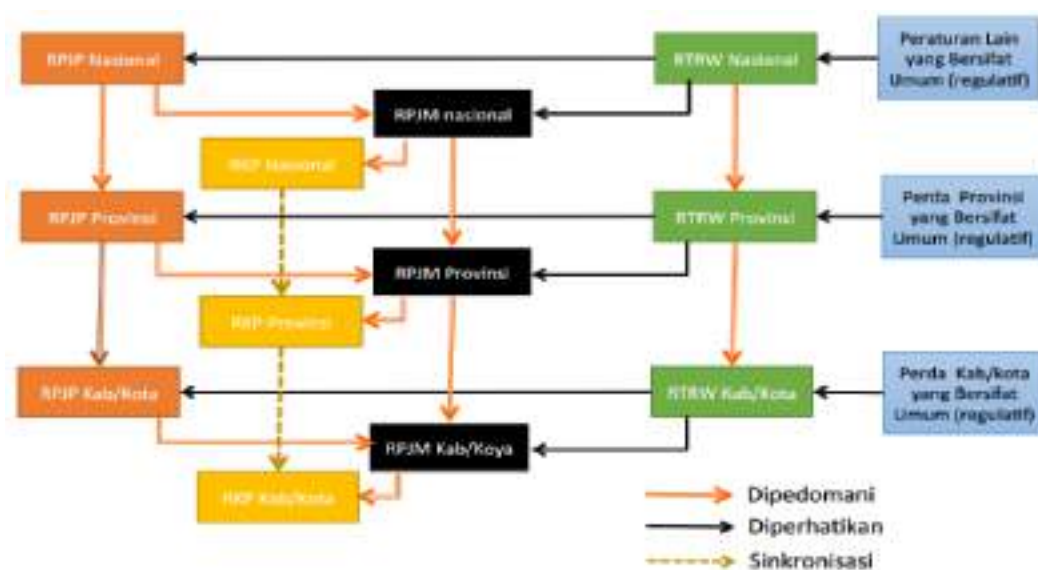
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan secara bertingkat dan terintegrasi, dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah, termasuk rencana strategis (Renstra) perangkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II Pasal 2 ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara berbagai pelaku pembangunan, baik antar tingkatan pemerintahan (pusat-daerah), antar sektor, maupun antar waktu. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah tersebut tergambar dalam skema berikut.



Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



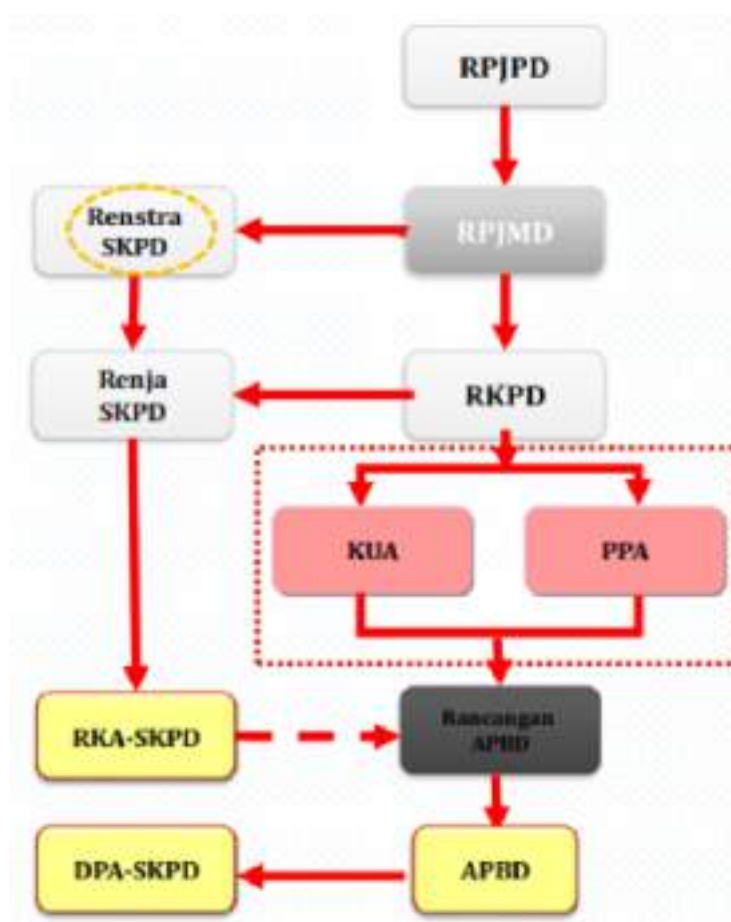
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 bagian KEDUA huruf b Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Bagian KETIGA huruf c Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bagian KEENAM huruf b Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Penyusunan dokumen pembangunan tersebut dilakukan secara hirarkis dan saling mempengaruhi satu sama lain. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan, RPJM Daerah, sebagai penjabaran visi Presiden dalam periode lima tahunan, berisi arah kebijakan, prioritas nasional, serta strategi pembangunan lintas sektor dan kewilayahan. Dalam konteks Kota Bekasi, berbagai isu strategis yang menjadi prioritas nasional seperti pengurangan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, pemenuhan standar pelayanan minimal, hingga pengelolaan lingkungan permukiman perlu disesuaikan dalam skala daerah.

Selain itu, Renstra juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini bersifat indikatif dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja organisasi. Renstra turut merujuk pada hasil evaluasi periode sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan penguatan strategi pembangunan ke depan. Berbagai hasil evaluasi tersebut juga perlu dibaca dalam konteks tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dinamika pembangunan Kota Bekasi menunjukkan tantangan yang semakin kompleks. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan hunian yang layak, serta tekanan terhadap ruang perkotaan yang terbatas. Keterbatasan lahan, tingginya permintaan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta keberadaan kawasan kumuh di beberapa lokasi menjadi persoalan mendesak yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel juga semakin meningkat, yang menuntut transformasi dalam sistem tata kelola pemerintahan. Sebagai respons atas tantangan tersebut, arah dan pendekatan kebijakan juga mengalami pergeseran.

Sebagai bagian dari sistem tersebut, Renstra Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Renstra ini disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Bekasi, serta memperhatikan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Integrasi antara kebijakan sektoral dan kebijakan spasial menjadi penting untuk memastikan sinergi antara pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang di sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perubahan kebijakan nasional, regional, dan global, termasuk arah pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital, juga turut membentuk konteks baru dalam perumusan kebijakan sektoral. Oleh karena itu, Renstra Disperkimtan Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga menjadi dokumen



strategis yang mampu mengarahkan pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan secara adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, Renstra memiliki nilai strategis dalam menghubungkan kepentingan masyarakat dengan arah pembangunan daerah.

Nilai strategis dari dokumen Renstra Disperkimtan Tahun 2025–2029 terletak pada kemampuannya dalam menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya responsif terhadap isu-isu aktual seperti backlog perumahan, urbanisasi, dan ketimpangan akses terhadap lahan, tetapi juga mampu mengarahkan transformasi kelembagaan dan penguatan pelayanan publik menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif. Dengan dasar tersebut, harapan terhadap penyusunan Renstra ini menjadi semakin jelas.

Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan Disperkimtan Kota Bekasi dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, tertata, dan berkeadilan, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Peraturan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang berlaku saat ini adalah PP Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2045;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020–2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020-2024; dan
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. Regulasi Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025–2045;



4. Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen arah Pembangunan jangka menengah daerah yang sedang dalam proses penetapan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024–2044;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2024–2044;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun;;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penataan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi;
13. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018, Perubahan-perubahannya tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
17. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep/716-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pengendalian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang perumahan, permukiman dan pertanahan selama periode lima tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra OPD Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, capaian program RPJMD, dan kegiatan pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
- b. Menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
- d. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- e. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja, baik secara internal maupun sebagai dasar penilaian akuntabilitas oleh publik dan lembaga pengawas eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM), kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Strategi Perangkat Daerah, Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU PD, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, kaidah pelaksanaan, kaidah pengendalian dan evaluasi.



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari Uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggungjawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyeharan perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;



5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretariat, 3 bidang, 3 Unit pelaksana Teknis Dinas serta Fungsional yaitu:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.



2. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkajian, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perumahan dan prasarana umum perumahan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, pembinaan, pengolahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, penyuluhan, penyusunan, inventarisasi, fasilitasi dan pengolahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman;
- f. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
- i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;



- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pendataan, penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis bangunan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tata bangunan gedung;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur bangunan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.



5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sederhana (UPTD Rusunawa)

Merupakan rumah susun sederhana sewa yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan akomodasi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dapat dihuni dan sewa secara bulanan maupun tahunan. Rumah Susun Umum Sewa sebagai salah satu bentuk permukiman vertikal, merupakan salah satu alternatif melakukan efisiensi penggunaan lahan dengan meningkatkan intensitas penggunaannya.

Untuk mendukung konsep pengembangan perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah yang dikaitkan pengembangan pembangunan daerah perkotaan secara vertikal dan untuk meremajakan daerah kumuh. Pengelolaan UPTD Rumah Susun Umum Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari:

- a. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Rusunawa;
- b. SOP Administrasi Umum dan Pemasaran Rusunawa;
- c. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan; dan
- d. SOP Administrasi dan Keuangan Rusunawa.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Air Limbah Domestik (UPTD PALD)

Memiliki tujuan mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Dalam perizinannya operator air limbah wajib mendapat izin dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya izin dari Wali Kota Bekasi, dan kewajiban tangka septik tank yang terintegrasi pada IMB. Untuk retribusi UPTD PALD disesuaikan dengan perda retribusi yang dikelola oleh instansi yang berwenang Tujuan dari UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melaksanakan tugas teknis pengolahan air limbah domestik dan berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tujuan atas:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan berkualitas lingkungan;
- d. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
- e. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman (UPTD Pemakaman)

UPTD Pemakaman merupakan kawasan pemakaman yang biasanya diatur oleh pemerintah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Lahan



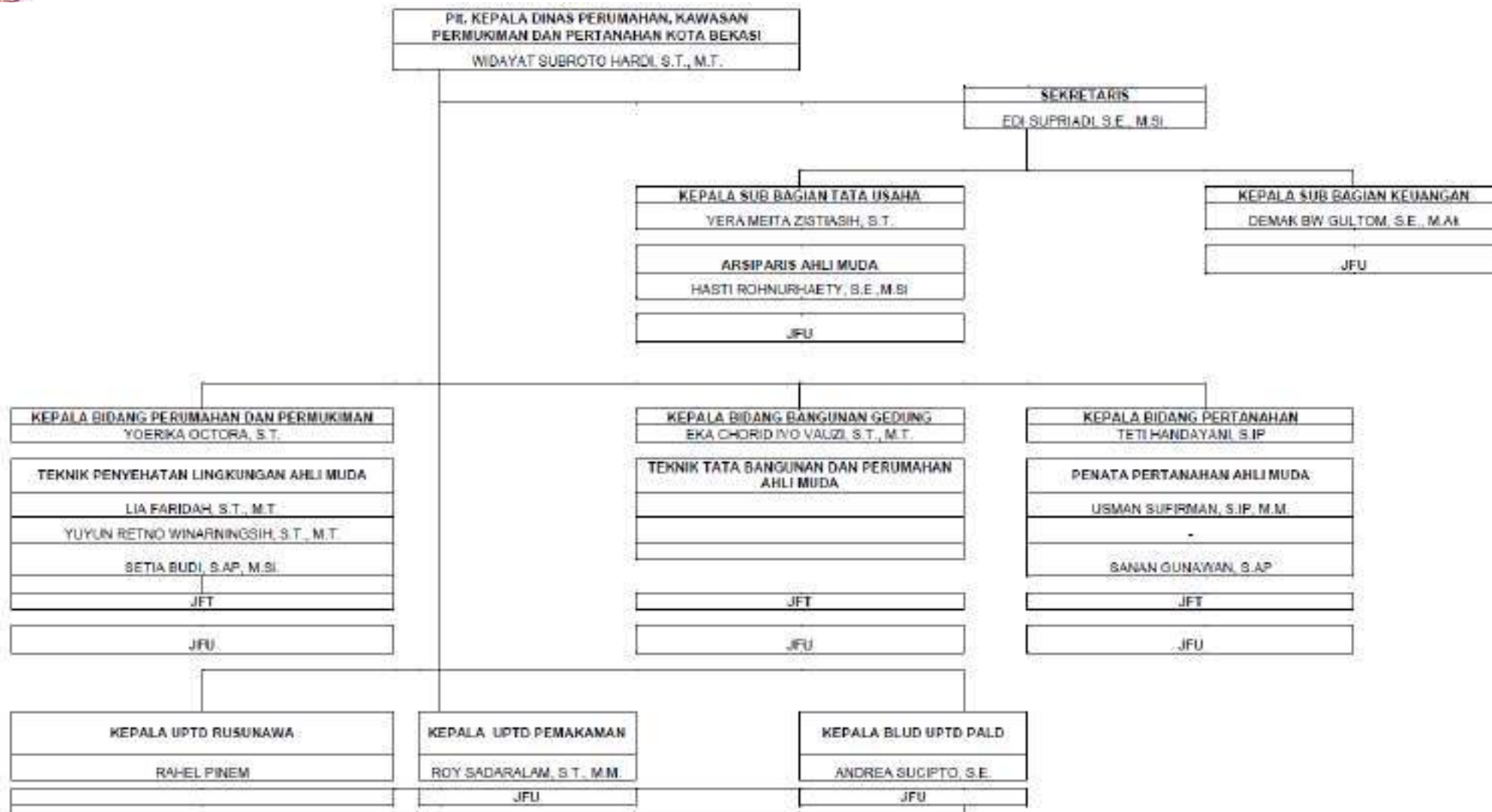
pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi diatur dan dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut. Pengelolaan UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari:

- a. SOP Penyusunan Jadwal Piket;
- b. SOP Sosialisasi Administrasi Perpanjangan Ijin Makam;
- c. SOP Pembukuan dan Penyetoran Retribusi Pengelolaan TPU;
- d. SOP Pelayanan Pemindahan Kerangka Jenazah;
- e. SOP Pelayanan Pemakaman;
- f. SOP Penyiapan Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana TPU;
- g. SOP Pembinaan Petugas Makam; dan
- h. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kegiatan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha.
 - b). Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
 - a). Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.
4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
 - a). Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - a). Penata Pertanahan Ahli Muda.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
 - a). UPTD Rusunawa.
 - b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
 - c). UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).
7. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - a). Penata Pertanahan Ahli Muda.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
 - a). UPTD Rusunawa.
 - b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
 - c). UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 Sekretariat, 3 Bidang, 9 Sub Bidang, 3 UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut Status Kepegawaian :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	79
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	47
3	Pekerja Harian Lepas (PHL)	191
	Total	317

Sumber: Data Kepagawaian DKPP, 2025

Dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 79 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 47 orang dan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 191 orang. Maka jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebanyak 317 orang. Selain itu untuk data ASN berdasarkan Golongan Bulan Januari tahun 2025 terdiri dari Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan III sebanyak 51 orang, Golongan II sebanyak 17 orang dan Golongan I sebanyak 2 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Kategori		Jumlah Pegawai
Golongan	IV	8
	III	51
	II	17
	I	2
Jumlah		79

Sumber: Data Kepagawaian DKPP, 2025

Sedangkan data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 terdiri dari strata 2 sebanyak 14 orang, strata 1 sebanyak 132 orang, Diploma sebanyak 17, Sekolah Menengah Atas sebanyak 157 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 11 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai data ASN berdasarkan pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3.



Tabel 2.3
Data ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Jenjang	ASN	TKK	PHL
S2	14		
S1	42	32	58
D3	6	4	7
SMA	16	11	130
SMP	1	0	32
SD	0	0	11
TOTAL	79	47	238

Sumber: Data Kepagawaian DKPP, 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Data Aset Perangkat Daerah

Inventarisasi aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset serta mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Pada Inventarisasi aset berwujud perlu dilakukan dua hal yaitu fisik dan aspek legal aset.

Tujuan inventarisasi aset Barang Milik Negara/Daerah adalah kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan Negara serta untuk tercapainya pengawasan yang efektif terhadap keuangan atau kekayaan Negara. Data aset yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Aset Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
1	Sepeda Motor	30	2005-2023	Inventaris/Baik
2	P.C. Unit	119	2000-2023	Inventaris/Baik
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	109	2009-2023	Inventaris/Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	16	1999-2021	Inventaris/Baik
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	114	2009-2023	Inventaris/Baik
6	Lemari Besi/Metal	47	2010-2022	Inventaris/Baik
7	Lemari Kaca	1	2018	Inventaris/Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	2009-2023	Inventaris/Baik
9	Meja Rapat	5	2008-2023	Inventaris/Baik
10	Kursi Rapat	112	2010-2023	Inventaris/Baik
11	Meja Tambahan	2	2023	Inventaris/Baik
12	Sofa	11	2015-2023	Inventaris/Baik
13	Kendaraan Toilet	1	2023	Inventaris/Baik
14	mesin proses lainnya (dst)	6	2010	Inventaris/Baik
15	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	4	2013-2015	Inventaris/Baik
16	Pompa Lumpur	1	2008	Inventaris/Baik
17	kendaraan bermotor khusus lainnya	1	2010	Inventaris/Baik



No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
	(dst)			
18	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1	2014	Inventaris/Baik
19	alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	6	2009-2018	Inventaris/Baik
20	Mesin Pemotong Rumput	37	2008-2024	Inventaris/Baik
21	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	2015	Inventaris/Baik
22	Filing Cabinet Besi	95	2004-2017	Inventaris/Baik
23	Alat Pengolah Air Limbah	2	2012-2018	Inventaris/Baik
24	Mobil Ambulance	5	2000-2021	Inventaris/Baik
25	Tandu dorong	2	2015-2016	Inventaris/Baik
26	Steam Cleaner	1	2015	Inventaris/Baik
27	Mesin Gergaji	2	2012-2019	Inventaris/Baik
28	Meja 1/2 Biro	64	2009-2015	Inventaris/Baik
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	2008-2022	Inventaris/Baik
30	Lampu	3	2011-2015	Inventaris/Baik
31	Sound System	3	2012-2021	Inventaris/Baik
32	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	1	2007	Inventaris/Baik
33	Meteran Kain	1	2009	Inventaris/Baik
34	Lemari Penyimpan	7	2014-2015	Inventaris/Baik
35	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	2010	Inventaris/Baik
36	Rak Besi	38	2010-2023	Inventaris/Baik
37	Brandkas	3	2012-2013	Inventaris/Baik
38	Alat Penghancur Kertas	9	2009-2021	Inventaris/Baik
39	Papan Pengumuman	1	2011	Inventaris/Baik
40	White Board	1	2014	Inventaris/Baik
41	Alat Kantor Lainnya	8	2010-2022	Inventaris/Baik
42	Lemari Kayu	2	2010-2011	Inventaris/Baik
43	Meja Kerja Kayu	2	2008	Inventaris/Baik
44	Kursi Besi/Metal	5	2011	Inventaris/Baik
45	Kursi Tamu	3	2011-2015	Inventaris/Baik
46	Kursi Putar	78	2010-2015	Inventaris/Baik
47	Kursi Biasa	3	2011	Inventaris/Baik
48	Bangku Tunggu	14	2014-2019	Inventaris/Baik
49	Meja Komputer	3	2008-2012	Inventaris/Baik
50	Meubeler lainnya	8	2007-2015	Inventaris/Baik
51	Lemari Es	2	2010	Inventaris/Baik
52	A.C. Window	9	2011-2016	Inventaris/Baik
53	Alat Pendingin lainnya	1	2014	Inventaris/Baik
54	Televisi	11	2010-2022	Inventaris/Baik
55	Camera film	1	2012	Inventaris/Baik
56	Dispenser	9	2014-2021	Inventaris/Baik
57	Handy Cam	2	2009	Inventaris/Baik
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	2008-2020	Inventaris/Baik
59	Lap Top	45	2009-2023	Inventaris/Baik
60	Note Book	16	2008-2017	Inventaris/Baik
61	Hub	1	2013	Inventaris/Baik
62	Meja Kerja Pejabat lain-lain	10	2013-2015	Inventaris/Baik
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	19	2010-2023	Inventaris/Baik
64	Kursi Rapat Ruangan Rapat	3	2010	Inventaris/Baik



No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
	Pejabat Eselon II			
65	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	5	2009	Inventaris/Baik
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2009-2015	Inventaris/Baik
67	Camera Video	10	2014-2018	Inventaris/Baik
68	Layar Film/Projector	6	2006-2023	Inventaris/Baik
69	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	2015	Inventaris/Baik
70	Drill Machine	1	2015	Inventaris/Baik
71	mesin bor lainnya (dst)	2	2015	Inventaris/Baik
72	Grating Generator Unit	1	2015	Inventaris/Baik
73	Amplifier	1	2015	Inventaris/Baik
74	Mesin Pembuat Huruf	1	2015	Inventaris/Baik
75	Global Positioning System	7	2015-2016	Inventaris/Baik
76	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	2015	Inventaris/Baik
77	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	2005	Inventaris/Baik
78	Bor	1	2016	Inventaris/Baik
79	Mesin Frais	1	2016	Inventaris/Baik
80	Slump Test Set	1	2016	Inventaris/Baik
81	Mesin Kompresor	1	2016	Inventaris/Baik
82	Server	2	2016-2023	Inventaris/Baik
83	Hard Disk	11	2016-2020	Inventaris/Baik
84	Telephone Mobile	22	2016	Inventaris/Baik
85	Mesin Cacah	6	2016	Inventaris/Baik
86	Sea Water Reservoir	1	2016	Inventaris/Baik
87	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	2016	Inventaris/Baik
88	Overhead Projector	2	2016-2019	Inventaris/Baik
89	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	44	2015-2020	Inventaris/Baik
90	alat ukur universal lainnya (dst)	8	2017	Inventaris/Baik
91	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	2015-2023	Inventaris/Baik
92	Alat Tangki Pengapungan	1	2017	Inventaris/Baik
93	Mesin Absensi	8	2017-2023	Inventaris/Baik
94	Tool Kit Box	2	2017	Inventaris/Baik
95	Generator	1	2018	Inventaris/Baik
96	Wireless	2	2018	Inventaris/Baik
97	Pompa Airasil	1	2018	Inventaris/Baik
98	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2	2018	Inventaris/Baik
99	pompa lainnya (dst)	4	2018-2023	Inventaris/Baik
100	A.C. Split	59	2018-2024	Inventaris/Baik
101	Pesawat Telephone	3	2019	Inventaris/Baik
102	Treng Air/Tandon Air	3	2020	Inventaris/Baik
103	Monitor	2	2020	Inventaris/Baik
104	Mesin Fotocopy Lainnya	1	2020	Inventaris/Baik
105	Control Panel	5	2020	Inventaris/Baik
106	Submersible Pump	1	2020	Inventaris/Baik
107	Microphone/Wireless MIC	1	2021	Inventaris/Baik
108	LCD Projector/Infocus	3	2021-2022	Inventaris/Baik
109	Tangga Aluminium	1	2021	Inventaris/Baik
110	Peralatan Las Listrik	1	2021	Inventaris/Baik



No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
111	Peralatan Permainan lainnya	1	2021	Inventaris/Baik
112	Kursi Lipat	40	2021	Inventaris/Baik
113	CCTV - Camera Control Television System	13	2021-2024	Inventaris/Baik
114	Mobil Jenazah	1	2021	Inventaris/Baik
115	excavator lainnya (dst)	1	2021	Inventaris/Baik
116	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	2021	Inventaris/Baik
117	Hand Fallet	1	2022	Inventaris/Baik
118	Pompa Air	8	2022-2024	Inventaris/Baik
119	Mesin Bor	1	2022	Inventaris/Baik
120	Alat Pembersih lainnya	1	2022	Inventaris/Baik
121	Camera Digital	1	2022	Inventaris/Baik
122	Alat Studio Lainnya	1	2022	Inventaris/Baik
123	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2023	Inventaris/Baik
124	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	2023	Inventaris/Baik
125	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	2023	Inventaris/Baik
126	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2023	Inventaris/Baik
127	Peralatan Komputer lainnya	1	2023	Inventaris/Baik
128	Sumur Pemboran Air	1	2023	Inventaris/Baik
129	Peta	1	2022	Inventaris/Baik
130	Handy Talky (HT)	1	2017	Inventaris/Baik
131	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	2024	Inventaris/Baik
132	Tangki Air	1	2024	Inventaris/Baik

Sumber : Data Kepagawaian DKPP, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam dokumen *strategic planning*. Sementara itu, pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

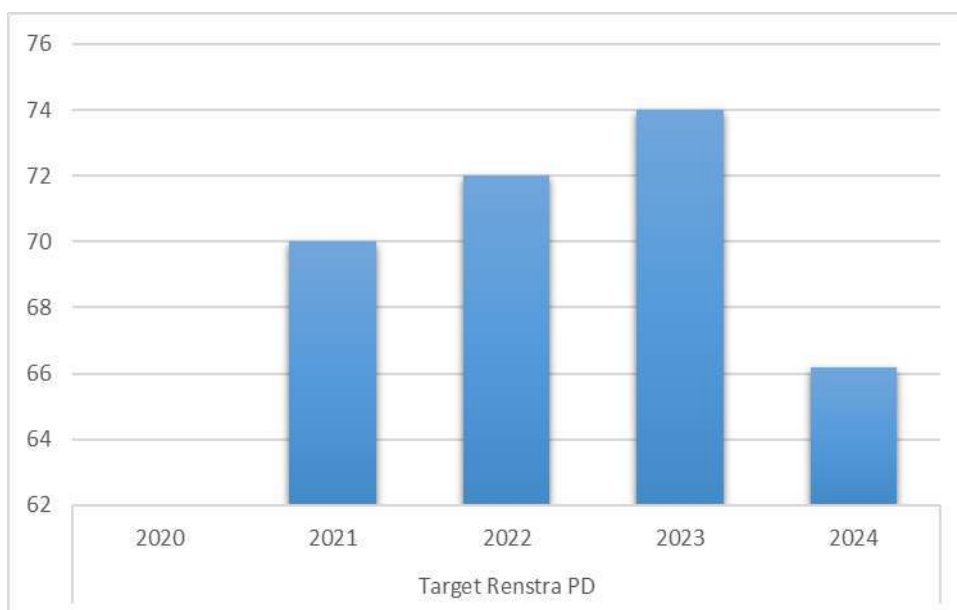
Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diukur berdasarkan capaian kinerja pada periode sebelumnya, meliputi:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah, meliputi:

a. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target Renstra Perangkat tahun 2020-tahun 2024 pada presentase peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengalami fluktuasi pada tahun 2021 sebesar 70,00% mengalami kenaikan sebesar 4 % menjadi 74,00% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,81% menjadi 66,19%.

Untuk lebih jelasnya mengenai presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2
Grafik Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

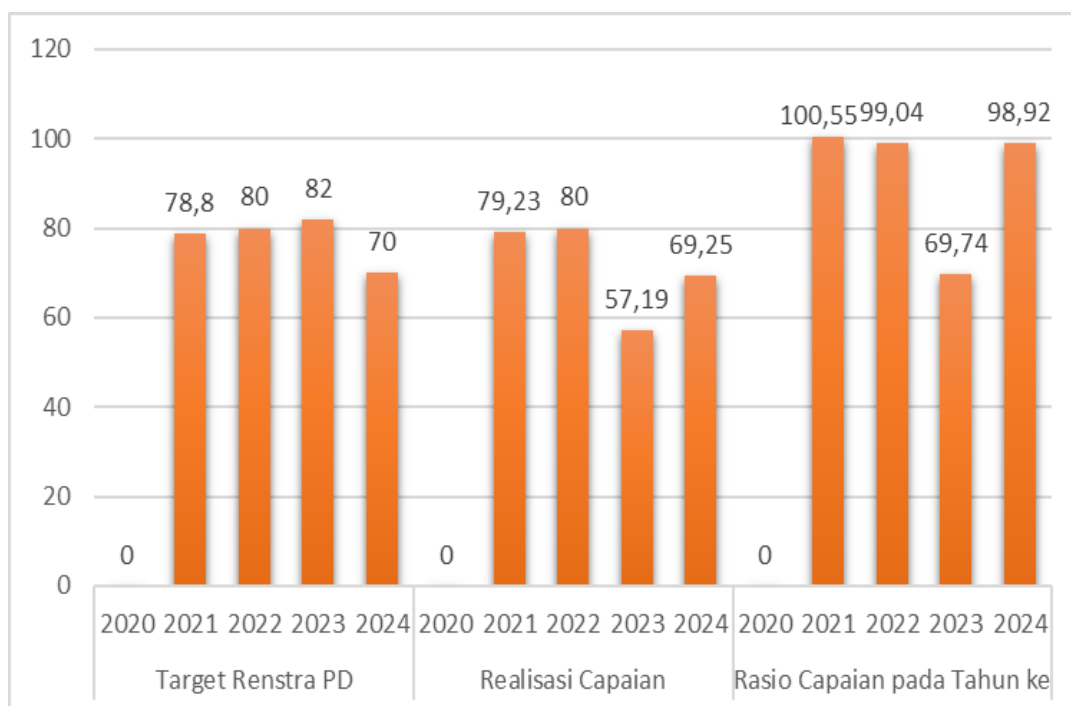
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan target restra perangkat daerah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahanm Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 sebesar 78,8 %, meningkat 3,2 % pada tahun 2023 menjadi 82 % dan mengalami penurunan sebesar 12 % pada tahun 2024 menjadi 70 %.

Berdasarkan realisasi capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahanm Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 sebesar 79,23%, mengalami kenaikan sebesar 0,77% pada tahun 2022 menjadi 80%, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,81% menjadi 57,19 % dan mengalami kenaikan sebesar 12,06% pada tahun 2024 menjadu 69,25%.

Berdasarkan rasio capaian pada tahun 2021 nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 100,55%, mengalami penurunan sebesar 1,51 pada tahun 2022 menjadi 99,04 %, mengalami penurunan kembali sebesar 29,3 % pada tahun 2023 menjadi 69,74 %, sedangkan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 29,18% menjadi 98,92 %.

Untuk lebih jelasnya mengenai nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3
Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

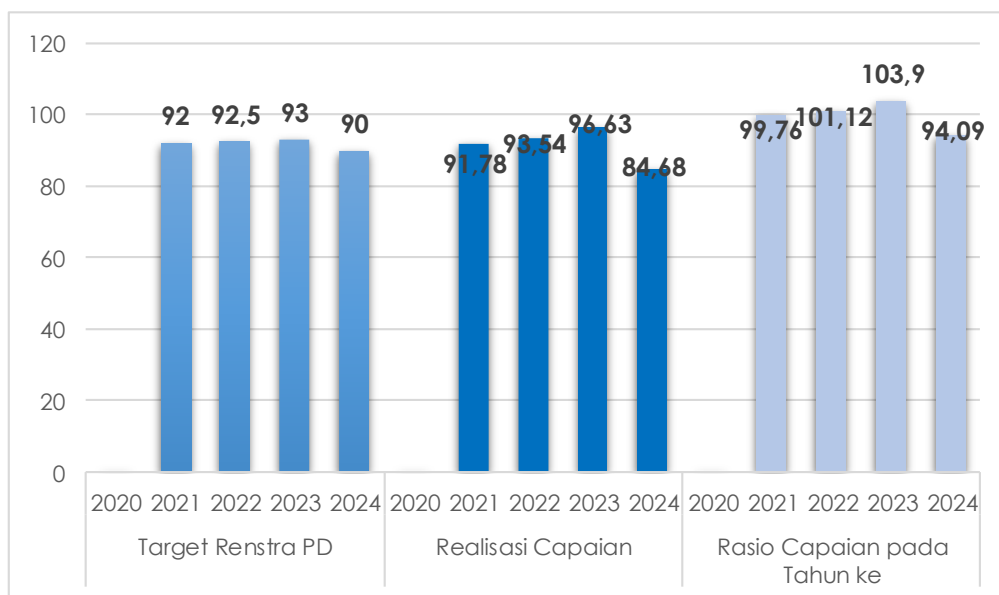
c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan target restra indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 92 % meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 93 % dan mengalami penurunan sebesar 3% pada tahun 2024 menjadi 90%.

Berdasarkan realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 91,78%, meningkat sebesar 1,76 % pada tahun 2022 menjadi 93,54%, kembali meningkat sebesar 3,09% pada tahun 2023 menjadi 96,63%, sedangkan tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan sebesar 11,95% menjadi 84,68%.

Berdasarkan rasio capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 99,76%, meningkat sebesar 1,36 % pada tahun 2022 menjadi 101,12%, kembali meningkat sebesar 2,78% pada tahun 2023 menjadi 103,9%, sedangkan tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat menurun sebesar 9,81 % menjadi 94,09 %.

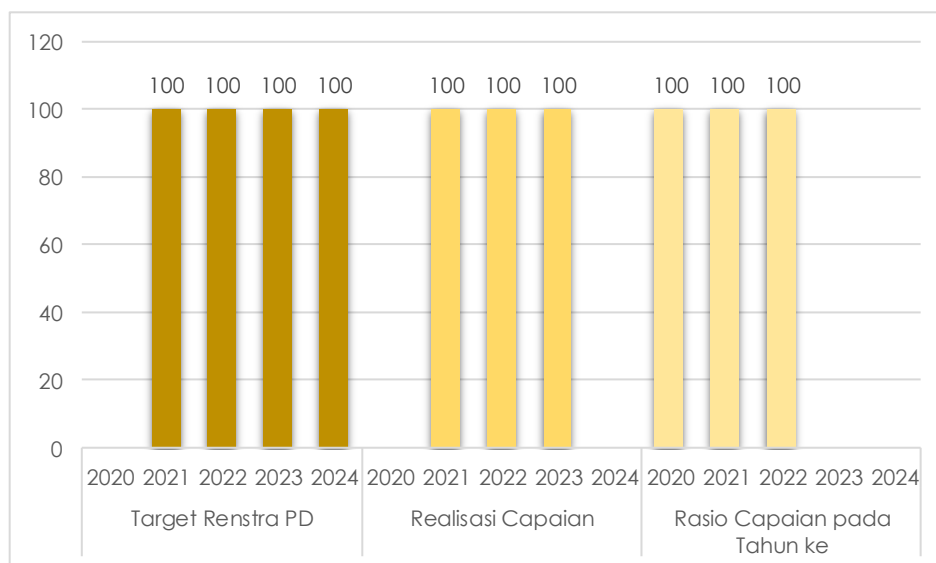
Untuk lebih jelasnya mengenai indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.4
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat

d. Optimalisasi Disiplin Aparatur

Berdasarkan target restra optimalisasi disiplin aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 %. Realisasi capaian optimalisasi disiplin aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi disiplin aparatur tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 %. Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi disiplin aparatur dapat dilihat pada gambar 2.5.



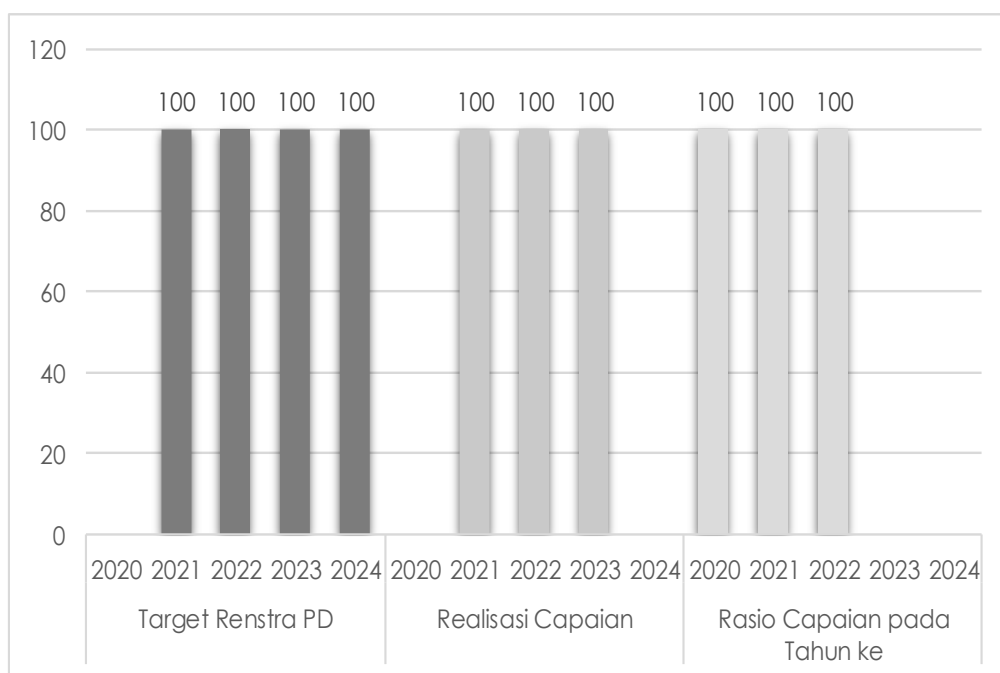
Gambar 2.5
Grafik Optimalisasi Disiplin Aparatur



e. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Berdasarkan target restra optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada gambar 2.6.



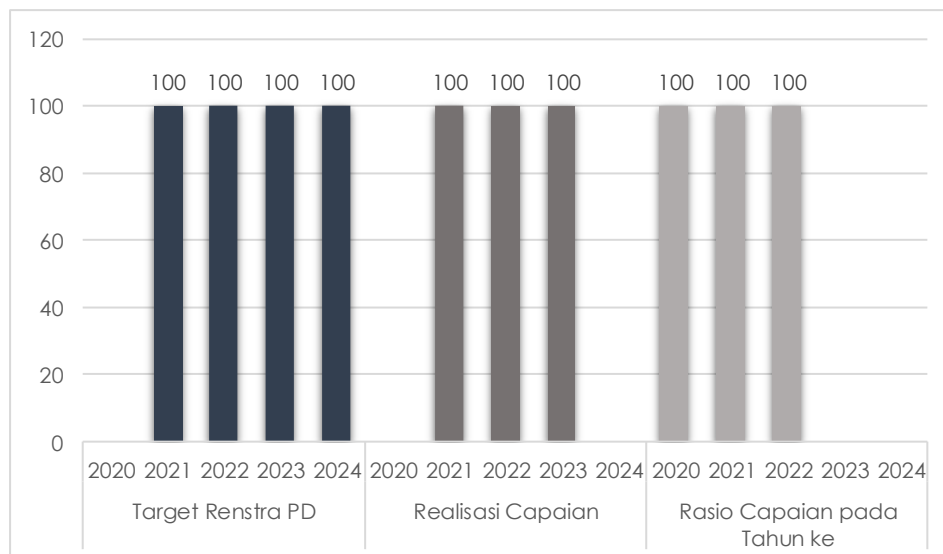
Gambar 2.6

Grafik Optimalisasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

f. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berdasarkan target restra optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran dapat dilihat pada gambar 2.7.

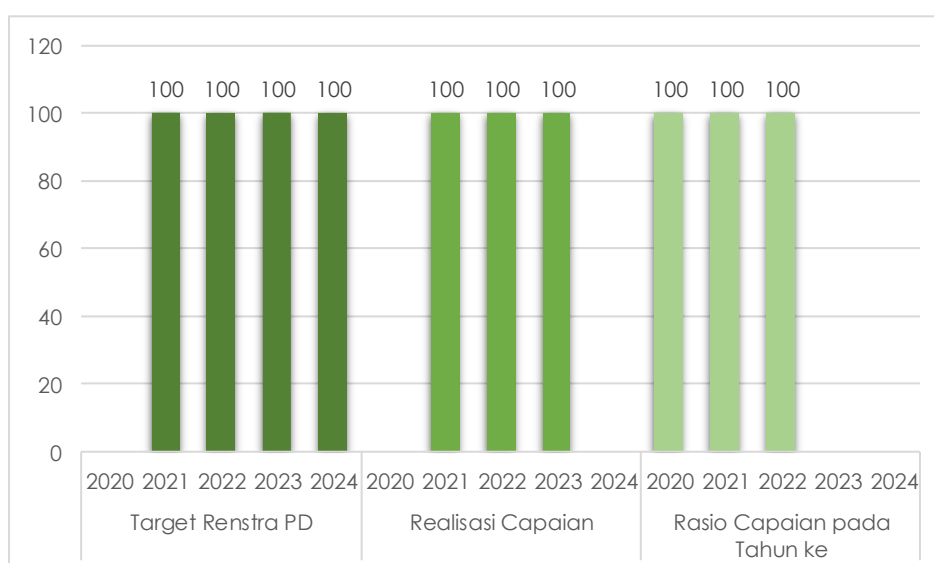


Gambar 2.7
Grafik Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

g. Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan target restra optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur dapat dilihat pada gambar 2.8.

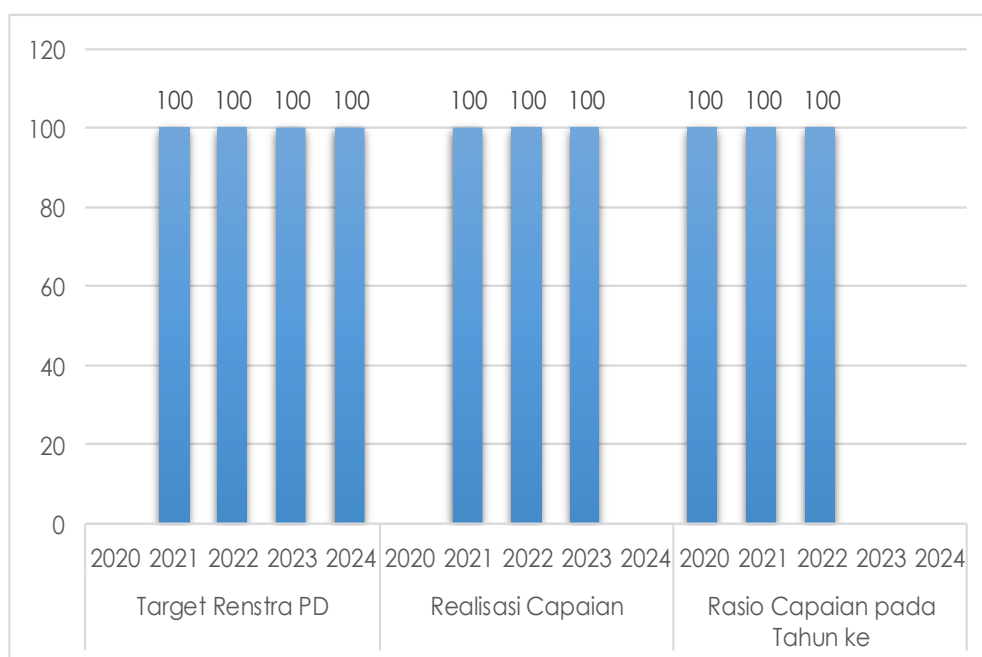


Gambar 2.8
Grafik Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur

h. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan target restra optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dapat dilihat pada gambar 2.9.



Gambar 2.9

Grafik Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

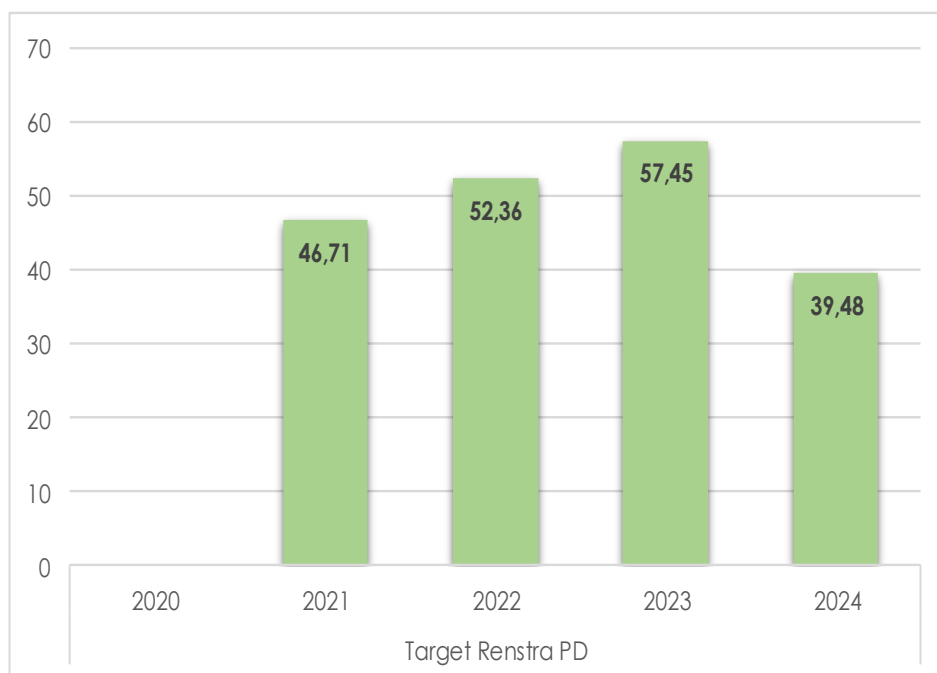
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Berdasarkan target restra persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran pada tahun 2021 sebesar 41,71 %, pada tahun 2022 persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran mengalami peningkatan sebesar 5,65 % menjadi 52,36 %, meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 5,09 % menjadi 57,45%, pada tahun 2024 persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran mengalami penurunan sebesar 17,97% menjadi 39,48%.



Untuk lebih jelasnya mengenai persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran dapat dilihat pada gambar 2.10.



Gambar 2.10
Grafik Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran

b. Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Berdasarkan target restra cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran pada tahun 2021 sebesar 46,71%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,65% menjadi 52,36%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 5,09 % menjadi 57,45%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,97% menjadi 39,48%.

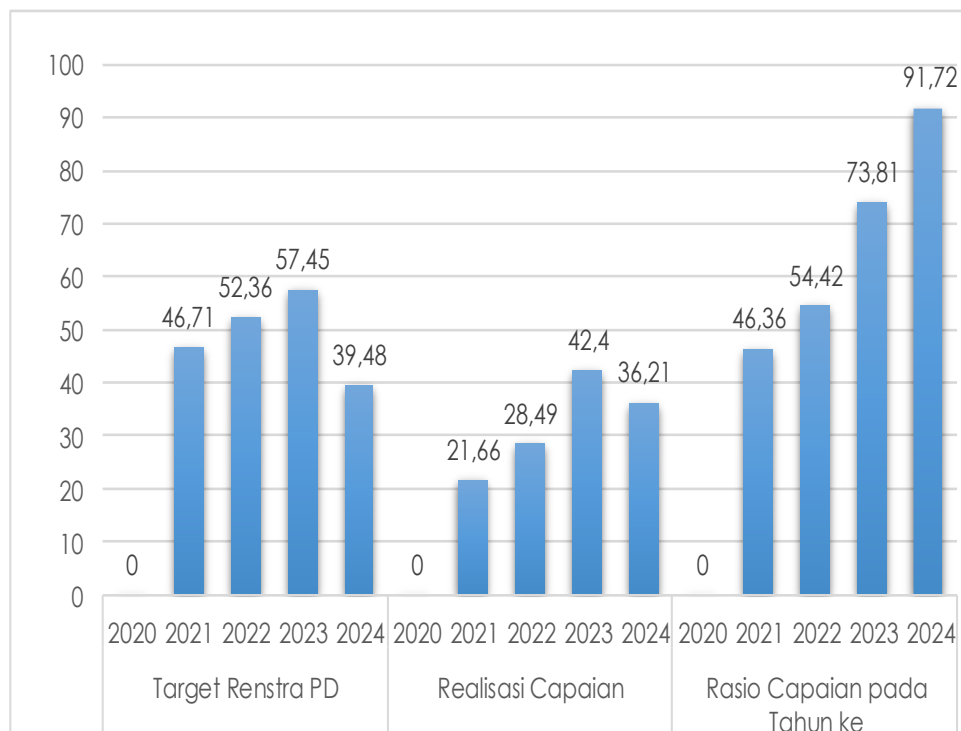
Berdasarkan realisasi capaian cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran tahun 2021 sebesar 21,66 %, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,83% menjadi 28,49 %, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,91% menjadi 42,4% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,19% menjadi 36,21%

Berdasarkan rasio capaian cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran pada tahun 2021 sebesar 46,36%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,06% menjadi 54,42%, pada tahun 2023



mengalami peningkatan sebesar 19,39 % menjadi 73,81 % dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,91 % menjadi 91,72%.

Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran dapat dilihat pada gambar 2.11.

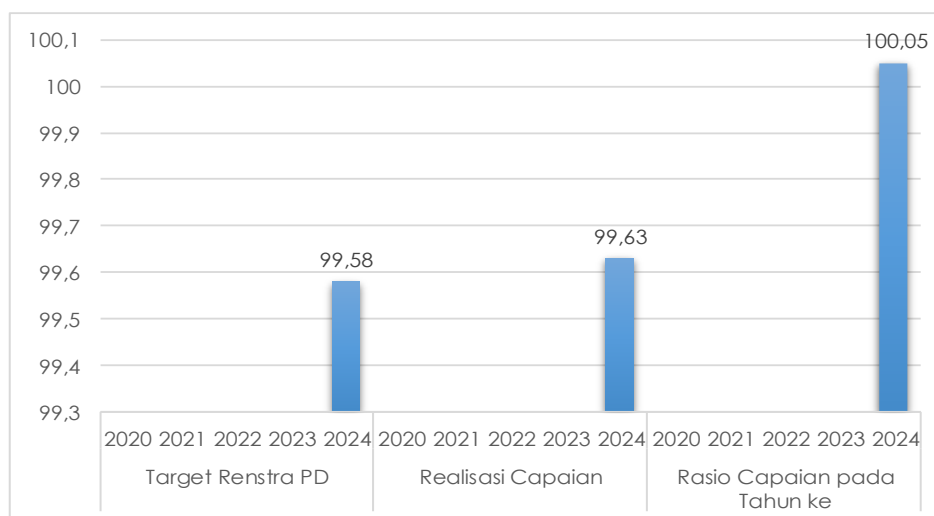


ambar 2.11
Grafik Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran

c. Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan target restra persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 99,58 %. Berdasarkan realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 99,63% dan berdasarkan rasio capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 100,05%.

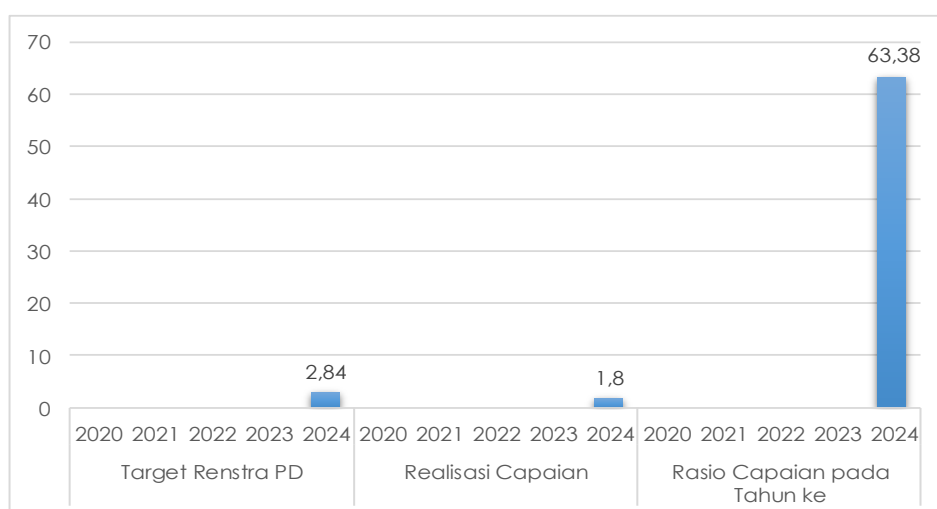
Untuk lebih jelasnya mengenai persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak dapat dilihat pada gambar 2.12.



Gambar 2.12
Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Layak

d. Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman

Berdasarkan target restra persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 2,84 %. Berdasarkan realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 1,8% dan berdasarkan rasio capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 63,38%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.13.



Gambar 2.13
Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Aman

3. Program Pengembangan Perumahan

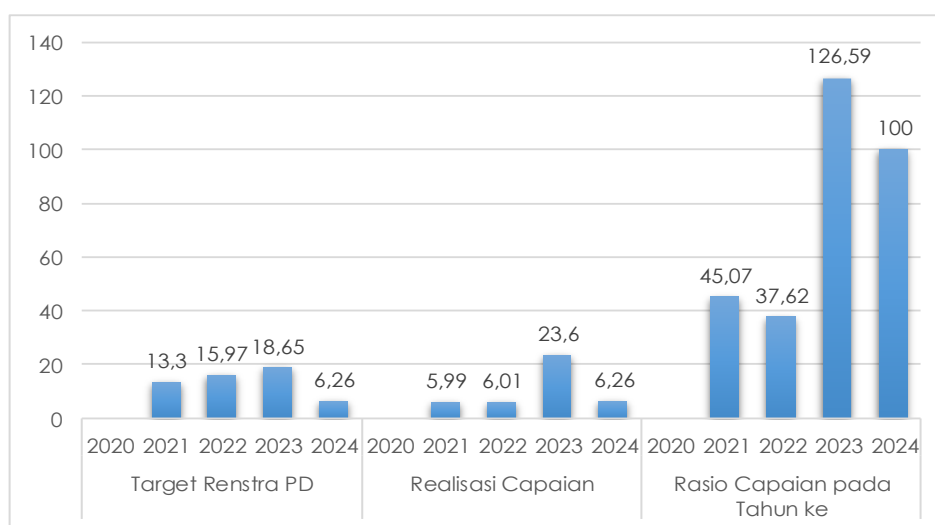
a. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau

Berdasarkan target restru cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 sebesar 13,3 %, pada tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 2,67% menjadi 15,97%, pada tahun 2023 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau meningkat sebesar 2,68% menjadi 18,65%, pada tahun 2024 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 12,39 % menjadi 6,26%.

Berdasarkan realisasi capaian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau tahun 2021 sebesar 5,99%, pada tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 0,02 % menjadi 6,01%, pada tahun 2023 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 17,59% menjadi 23,6% dan pada tahun 2024 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 17,34% menjadi 6,26%.

Berdasarkan rasio capaian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 sebesar 45,07 %, pada tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 7,45% menjadi 37,62 %, pada tahun 2023 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 88,97% menjadi 126,59% dan pada tahun 2024 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 26,59% menjadi 100%.

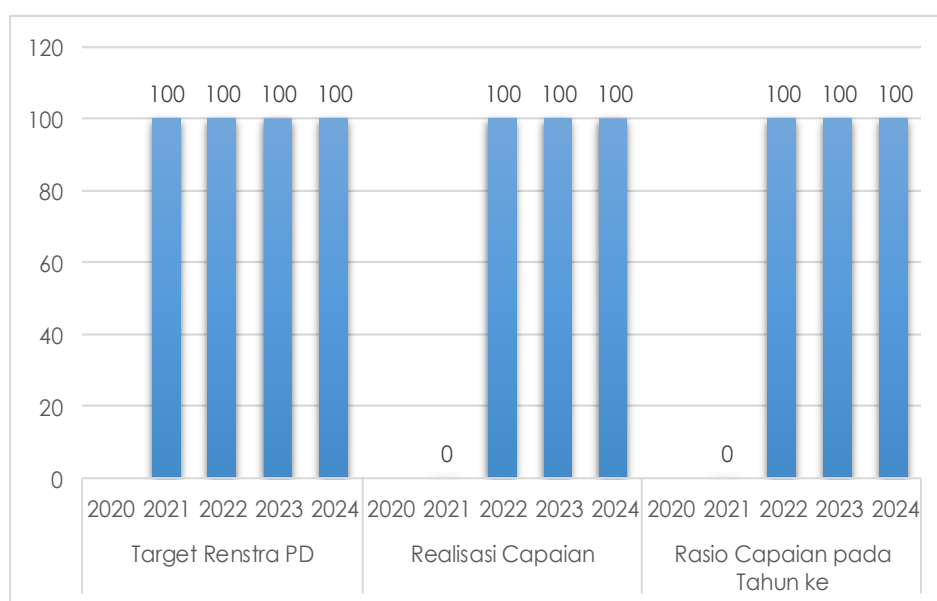
Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dapat dilihat pada gambar 2.14.



Gambar 2.14
Grafik Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

b. Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota

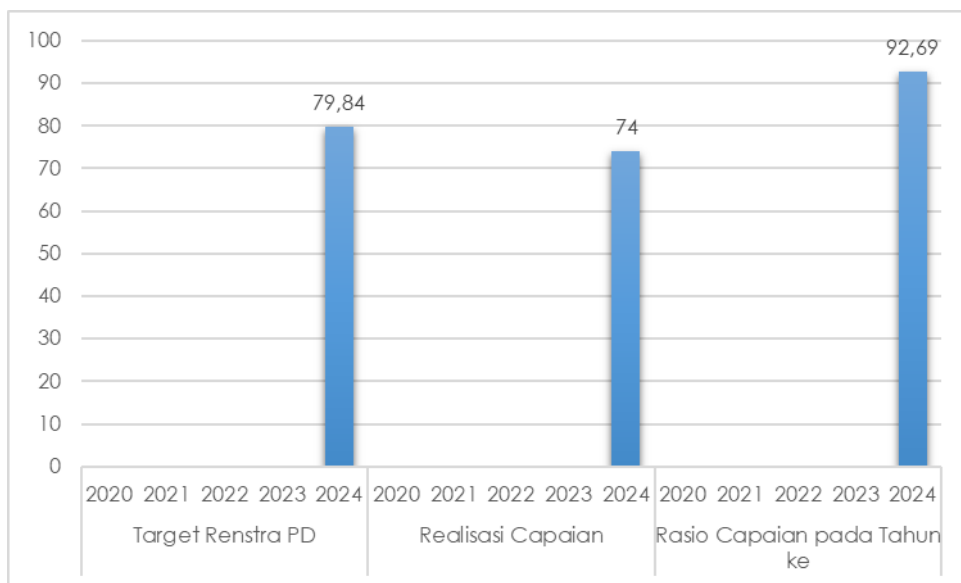
Berdasarkan target restra persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan rasio capaian persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota dapat dilihat pada gambar 2.15.



Gambar 2.15
Grafik Persentase Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kota

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan termasuk pada program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan target restra pada tahun 2024 sebesar 79,84%, untuk realisasi capaian tahun 2024 sebesar 74% dan rasio capaian tahun 2024 sebesar 92,69%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.16.



Gambar 2.16
Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Yang Diremajakan/Dipugar Dikawasan Perkotaan

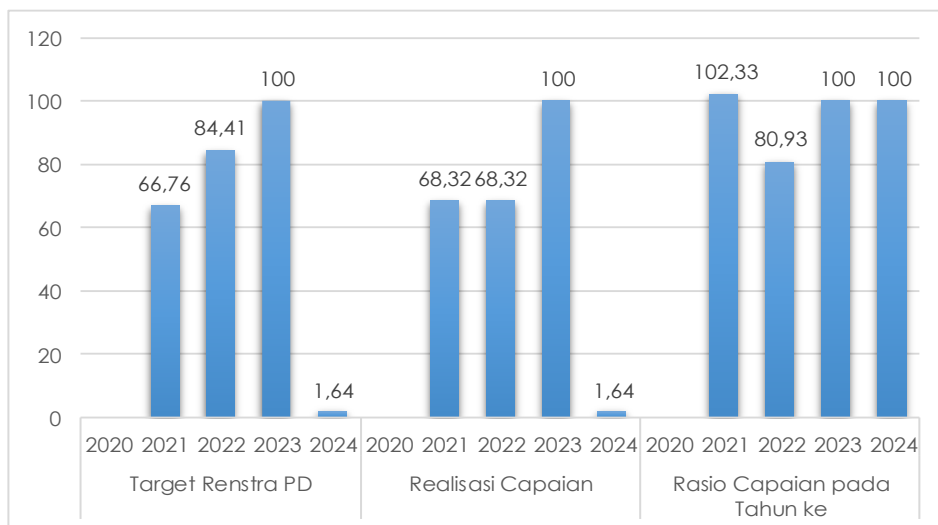
5. Program Kawasan Permukiman

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan termasuk kedalam program kawasan permukiman. Berdasarkan target restra persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2021 sebesar 66,76%, pada tahun 2022 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 17,65 % menjadi 84,41%, pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 15,59 % menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebesar 98,36% menjadi 1,64%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 68,32 %, pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 31,68 % menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebesar 89,36% menjadi 1,64%.

Berdasarkan rasio capaian persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2021 sebesar 102,33 %, pada tahun 2022 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebesar 21,4% menjadi 80,93 %, pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 19,07% menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sama sebesar 100%.

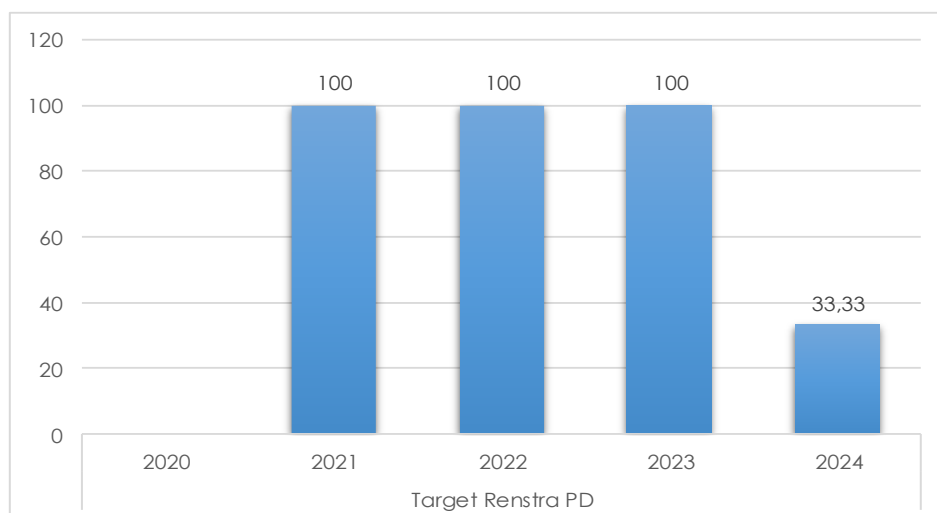
Untuk lebih jelasnya mengenai persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.17.



Gambar 2.17
Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot termasuk kedalam program penyelesaian sengketa tanah garapan. Berdasarkan target restra persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 %, pada tahun 2024 persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot mengalami penurunan sebesar 66,67 % menjadi 33,33%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot dapat dilihat pada gambar 2.18.



Gambar 2.18
Grafik Persentase Terfasilitasinya Konflik Perkara Pertanahan Milik Pemkot



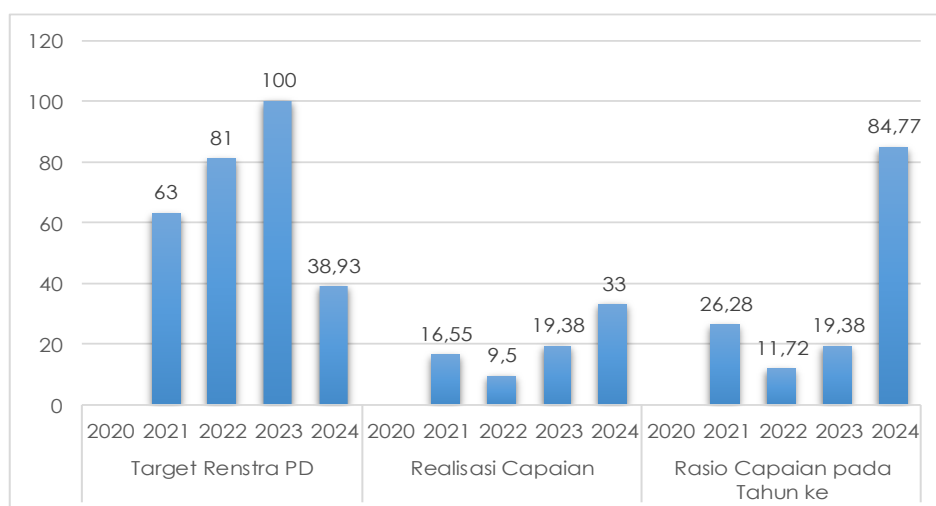
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Persentase pemenuhan pengadaan tanah termasuk kedalam program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Berdasarkan target restra persentase pemenuhan pengadaan tanah tahun 2021 sebesar 63%, pada tahun 2022 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 18% menjadi 81%, pada tahun 2023 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 19 % menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami penurunan sebesar 61,07% menjadi 38,93%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase pemenuhan pengadaan tanah tahun 2021 sebesar 16,55 %, pada tahun 2022 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami penurunan sebesar 7,05% menjadi 9,5%, pada tahun 2023 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 9,88% menjadi 19,38% sedangkan tahun 2024 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 13,62% menjadi 33 %.

Berdasarkan rasio capaian persentase pemenuhan pengadaan tanah tahun 2021 sebesar 26,28%, pada tahun 2022 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami penurunan sebesar 14,56% menjadi 11,72 %, pada tahun 2023 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 7,66% menjadi 19,38% dan pada tahun 2024 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 65,39% menjadi 84,77%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase pemenuhan pengadaan tanah dapat dilihat pada gambar 2.19.



Gambar 2.19
Grafik Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah



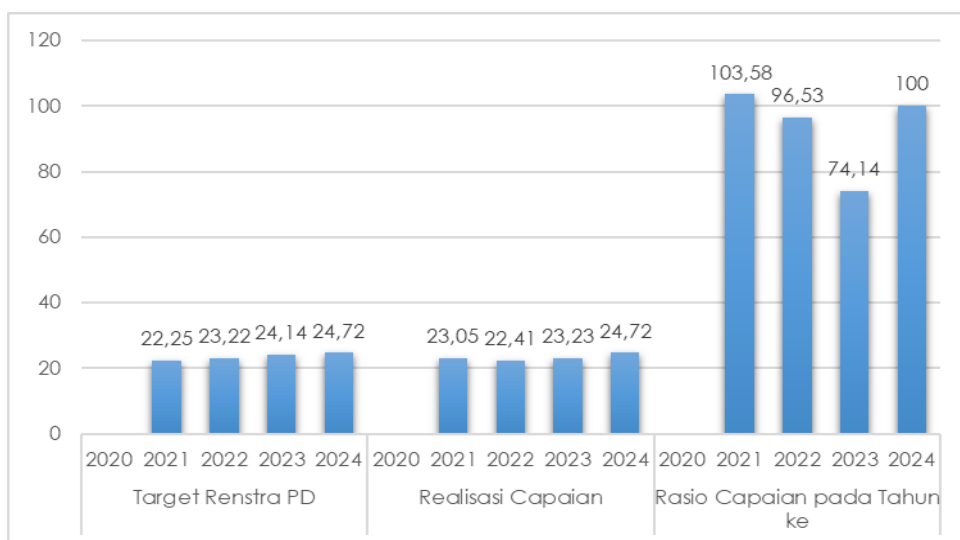
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum termasuk kedalam program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum. Berdasarkan target restra persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 sebesar 22,25 %, pada tahun 2022 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,97% menjadi 23,22%, pada tahun 2023 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,92% menjadi 24,14 % dan pada tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,58% menjadi 24,72 %.

Berdasarkan realisasi capaian persentase penduduk berakses air minum tahun 2021 sebesar 23,05%, pada tahun 2022 persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 0,64 % menjadi 22,41%, tahun 2023 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,82% menjadi 23,23%, pada tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 1,49% menjadi 24,72%.

Berdasarkan rasio capaian persentase penduduk berakses air minum tahun 2021 sebesar 103,58%, pada tahun 2022 persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 7,05% menjadi 96,53%, pada tahun 2023 persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 22,39% menjadi 74,14% dan pada tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 25,86% mnjadi 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat pada gambar 2.20.



Gambar 2.20
Grafik Persentase Penduduk Berakses Air Minum

9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

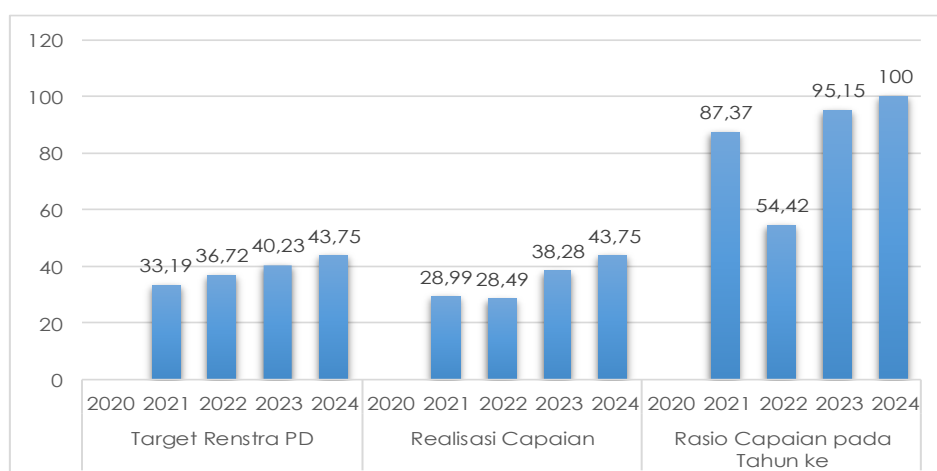
a. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Berdasarkan target restra cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2021 sebesar 33,19%, pada tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 3,53% menjadi 36,72%, pada tahun 2023 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 3,51% menjadi 40,23% sedangkan tahun 2024 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 3,52% menjadi 43,75%.

Berdasarkan realisasi capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU tahun 2021 sebesar 28,99%, pada tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami penurunan sebesar 0,5% menjadi 28,49%, tahun 2023 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 9,79% menjadi 38,28% dan pada tahun 2024 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 5,47% menjadi 43,75%.

Berdasarkan rasio capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2021 sebesar 87,37%, pada tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami penurunan sebesar 32,95% menjadi 54,42%, pada tahun 2023 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 40,73% menjadi 95,15% dan pada tahun 2024 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 4,85% menjadi 100%.

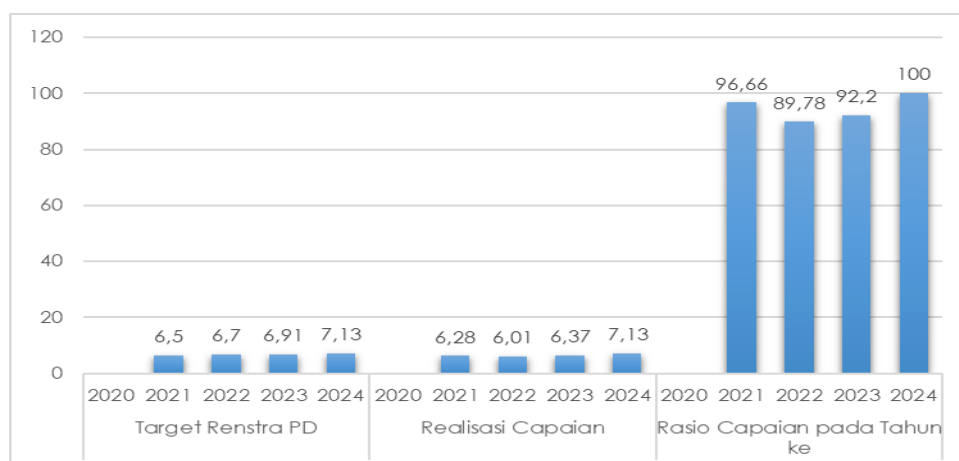
Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dilihat pada gambar 2.21.



Gambar 2.21
Grafik Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

b. Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum

Berdasarkan target restra jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum tahun 2021 sebesar 6,5%, pada tahun 2022 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,2% menjadi 6,7%, pada tahun 2023 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi 6,91% dan pada tahun 2024 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,22% menjadi 7,13%. Berdasarkan realisasi capaian jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum tahun 2021 sebesar 6,28%, pada tahun 2022 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami penurunan sebesar 0,27% menjadi 6,01%, tahun 2023 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,36 % menjadi 6,37%. Berdasarkan rasio capaian jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum tahun 2024 sebesar 96,66 %, pada tahun 2022 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami penurunan sebesar 6,88% menjadi 89,78%, pada tahun 2023 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 2,42 % menjadi 92,2% dan pada tahun 2024 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 7,8 % menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum dapat dilihat pada gambar 2.22.



Gambar 2.22
Grafik Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum

10. Program Penataan Bangunan Gedung

a. Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi

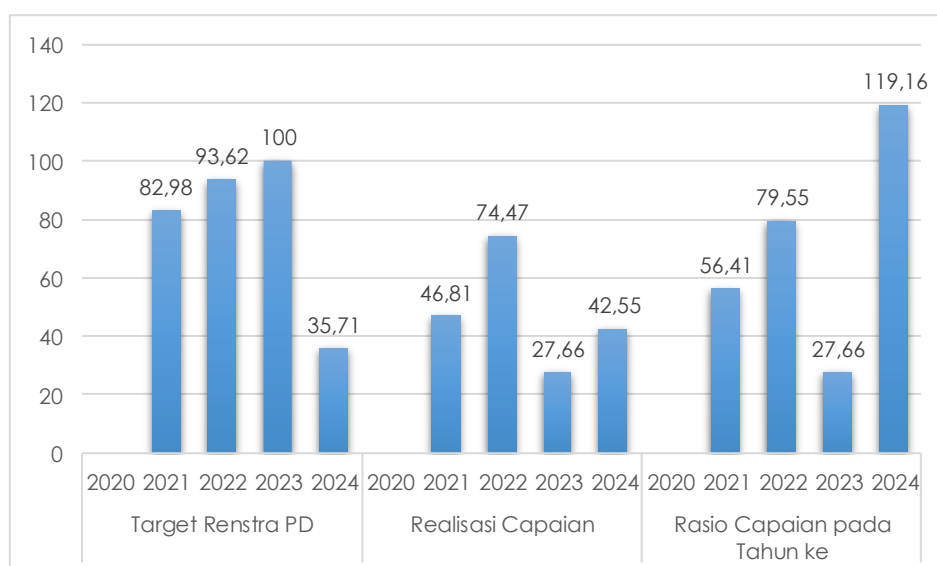
Berdasarkan target restra persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 82,98%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 10,64% menjadi 93,62%, pada tahun 2023 persentase



ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 6,38% menjadi 100%, sedangkan tahun 2024 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 64,29% menjadi 35,71%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 46,81%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 27,66% menjadi 74,47%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 46,81% menjadi 27,66% dan pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 14,89% menjadi 42,55%

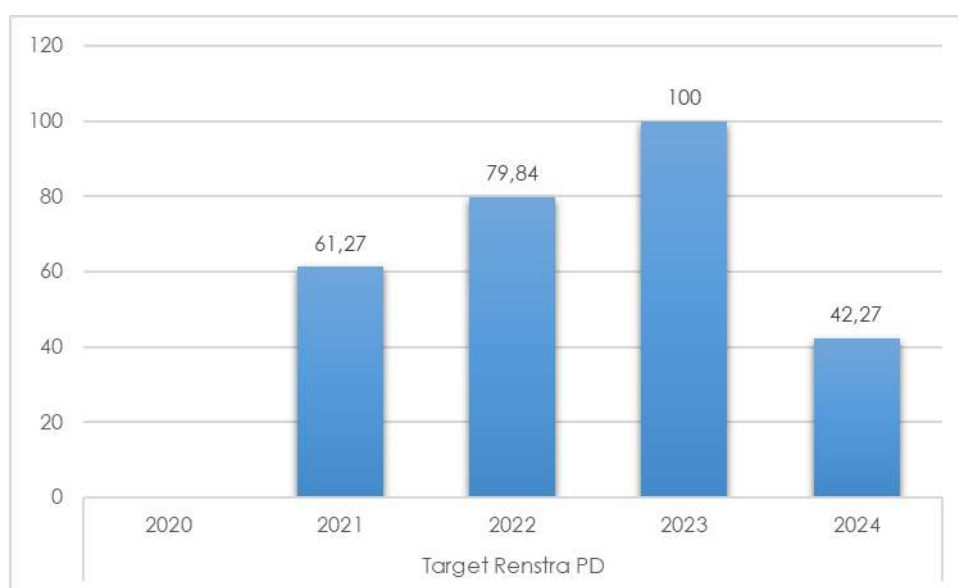
Berdasarkan rasio capaian persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2022 sebesar 56,41%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 23,14% menjadi 79,55%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 51,89% menjadi 27,66% dan pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 91,5% menjadi 119,16%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi dapat dilihat pada gambar 2.23.



Gambar 2.23
Grafik Persentase Ketersediaan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Dan Berfungsi

b. Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

Berdasarkan target restra persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 61,27%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 18,57% menjadi 79,84%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 20,16 % menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 57,73% menjadi 42,27%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.24.



Gambar 2.24

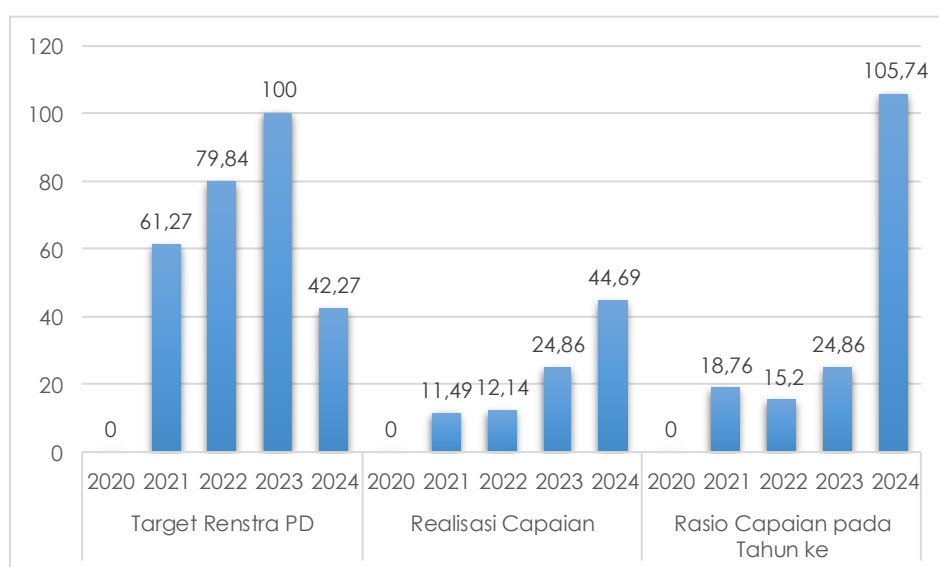
Grafik Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas Baik

c. Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik

Berdasarkan target restra persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 61,27%, pada tahun 2022 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 18,57% menjadi 79,84%, pada tahun 2023 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 20,16% menjadi 100%, dan pada tahun 2024 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 57,73% menjadi 42,27%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik tahun 2021 sebesar 11,49%, pada tahun 2022 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 0,65% menjadi 12,14%, pada tahun 2023 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan

sebesar 12,72% menjadi 24,86% dan pada tahun 2024 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 19,83% menjadi 44,69%. Berdasarkan rasio capaian persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 18,76%, pada tahun 2022 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 3,56 % menjadi 15,2%, pada tahun 2023 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 9,66% menjadi 24,86% dan pada tahun 2024 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 80,88% menjadi 105,74%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.25.



Gambar 2.25
Grafik Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik

11. Program Pengelolaan Pendidikan

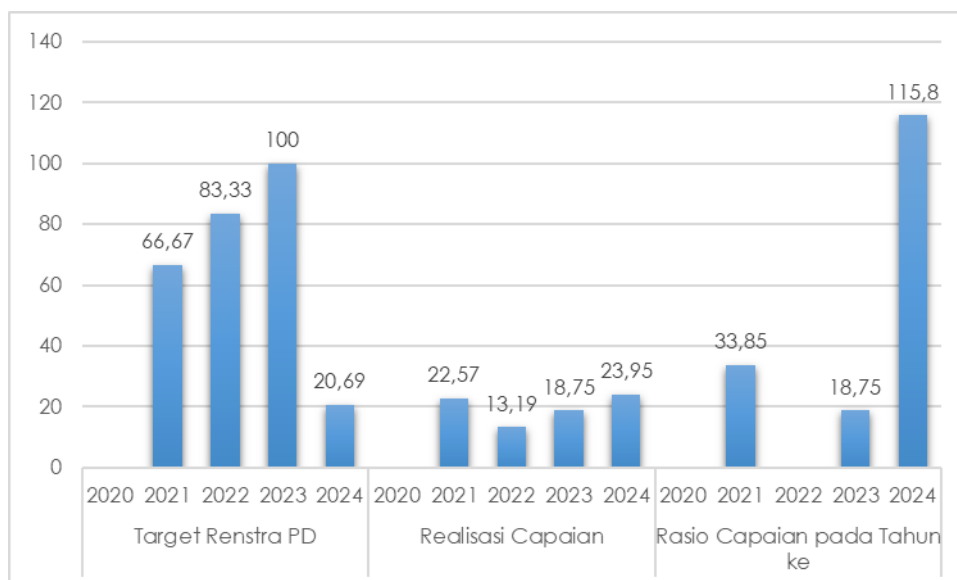
a. Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik

Berdasarkan target restra persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 66,67 %, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 16,66 % menjadi 83,33%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 16,67% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 79,31% menjadi 20,69%. Berdasarkan realisasi capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 22,57%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami penurunan

sebesar 9,38% menjadi 13,19%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 5,56% menjadi 18,75% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 5,2 % menjadi 23,95%.

Berdasarkan rasio capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 33,85%, persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 18,75% dan persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 97,05% menjadi 115,8%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar 2.26.



Gambar 2.26

Grafik Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik

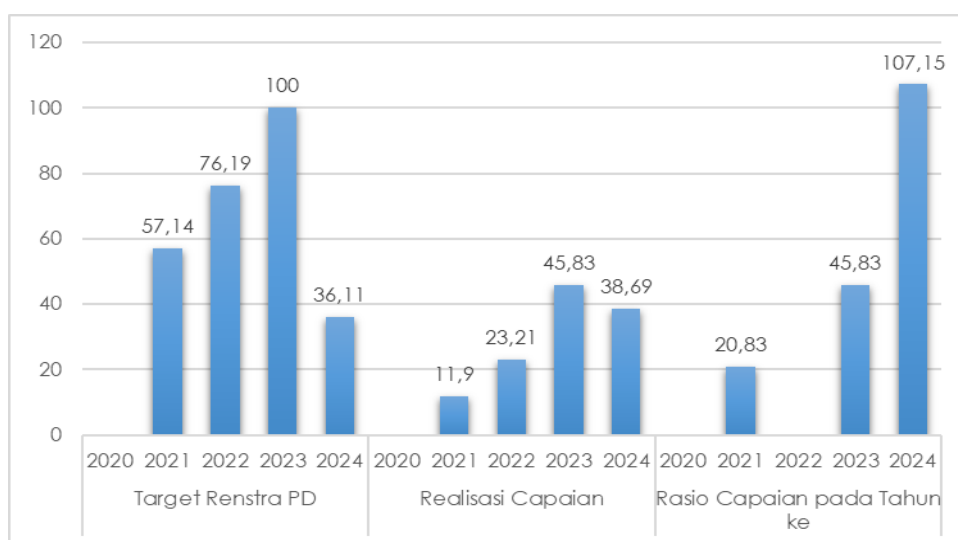
b. Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik

Berdasarkan target restra persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 57,14%, pada tahun 2022 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 19,05% menjadi 76,19%, pada tahun 2023 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 23,81% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 63,89% menjadi 36,11%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 11,9%, pada tahun 2022 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar

11,31% menjadi 23,21%, pada tahun 2023 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 22,62% menjadi 45,83% dan pada tahun 2024 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 7,14 % menjadi 38,69%.

Berdasarkan rasio capaian persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 20,83%, pada tahun 2023 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik sebesar 45,83% dan pada tahun persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik sebesar 107,15%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar 2.27.



Gambar 2.27

Grafik Persentase Bangunan SMPN Disetiap Kelurahan Dalam Kondisi Baik

c. Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik

Berdasarkan target restra persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 60%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 80%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 30% menjadi 70%.

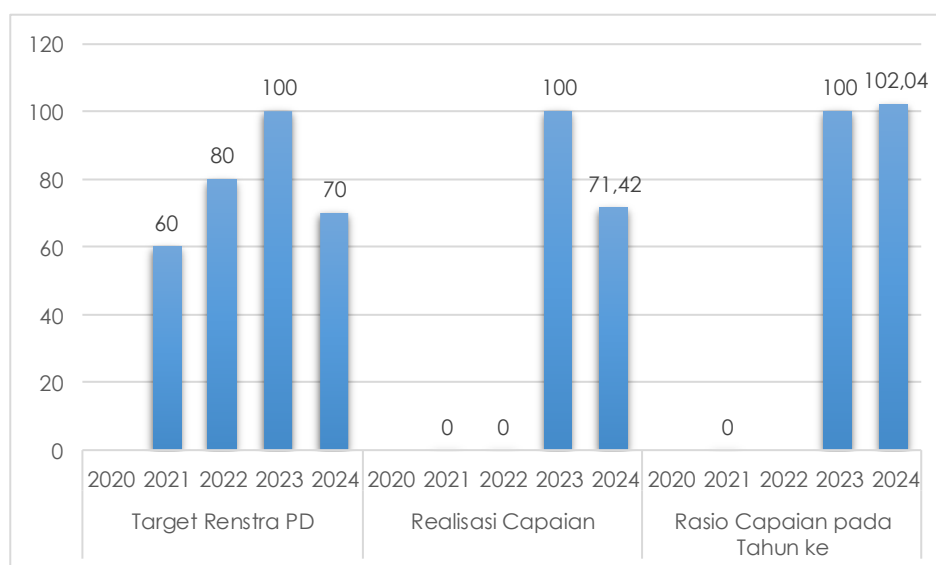
Berdasarkan realisasi capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 100% dan persentase



sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 28,58% menjadi 71,42%

Berdasarkan rasio capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 100% dan persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,04% menjadi 102,04%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar 2.28.

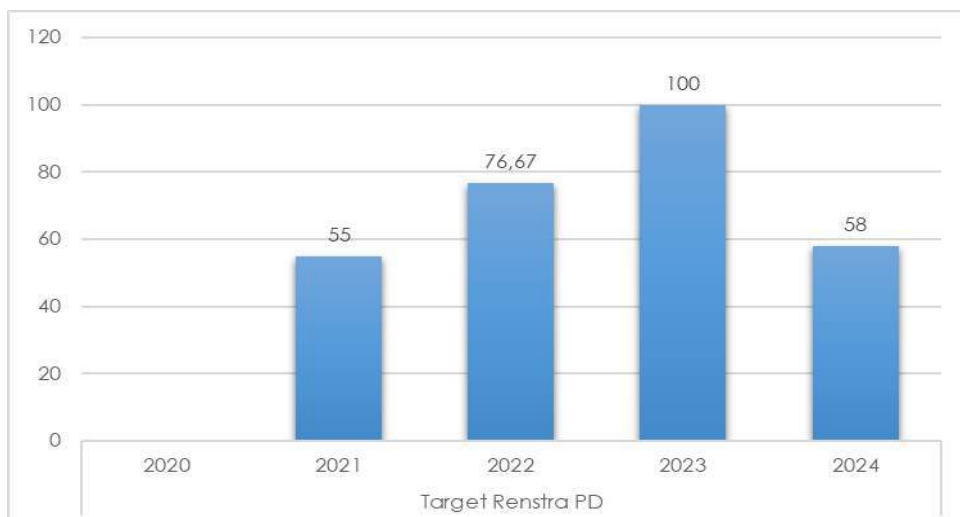


Gambar 2.28
Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dalam Kondisi Baik

d. Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik

Berdasarkan target restra persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 55%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 21,67 % menjadi 76,67%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 23,33% menjadi 100% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 42% menjadi 58%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.29.



Gambar 2.29

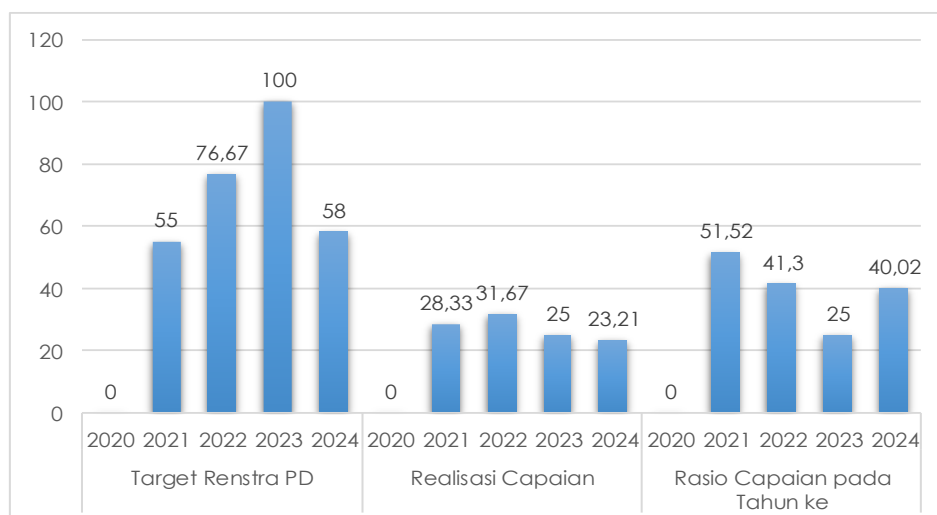
Grafik Persentase Sarana Dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas Baik

e. Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik

Berdasarkan target restra persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 55%, pada tahun 2022 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 21,67% menjadi 76,67%, pada tahun 2023 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 23,33% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 42% menjadi 58%. Berdasarkan realisasi capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 28,33%, pada tahun 2022 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 3,34% menjadi 31,67%, pada tahun 2023 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 6,67% menjadi 25% dan pada tahun 2024 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 1,79% menjadi 23,21%.

Berdasarkan rasio capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 51,52 %, pada tahun 2022 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 10,22% menjadi 41,3%, pada tahun 2023 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 16,3% menjadi 25% dan pada tahun 2024 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 15,02% menjadi 40,02%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.39.



Gambar 2.30
Grafik Persentase Gedung Kesehatan Yang Berkualitas Baik

12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

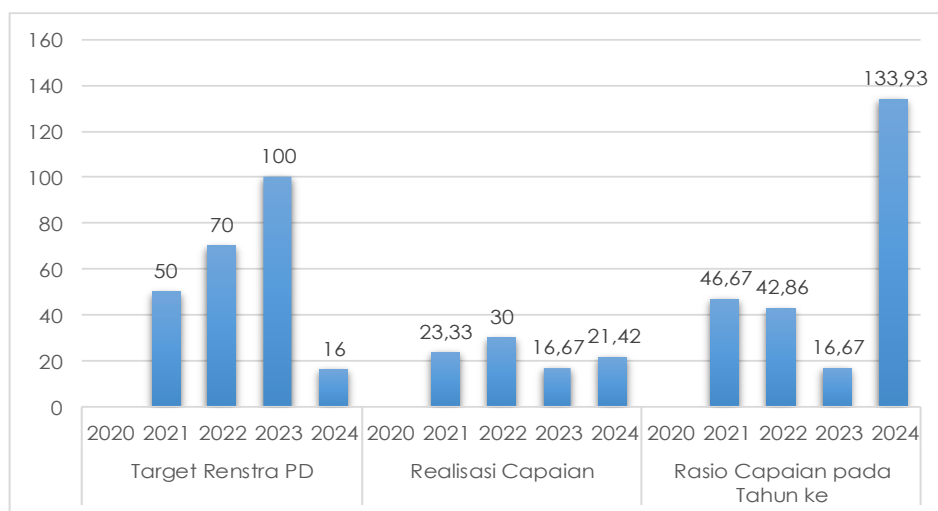
a. Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned)

Berdasarkan target restra persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) pada tahun 2021 sebesar 50%, pada tahun 2022 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 70%, pada tahun 2023 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 30% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 84% menjadi 16%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) pada tahun 2021 sebesar 23,33%, pada tahun 2022 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 6,67% menjadi 30%, pada tahun 2023 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 13,33% menjadi 16,67% dan pada tahun 2024 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 4,75% menjadi 21,42%.

Berdasarkan rasio capaian persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) pada tahun 2021 sebesar 46,67%, pada tahun 2022 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 3,81%, pada tahun 2023 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 26,19% menjadi 16,67% dan pada tahun 2024 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 117,26% menjadi 133,93%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) dapat dilihat pada gambar 2.31.



Gambar 2.31
Grafik Persentase Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Poned)

b. Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi

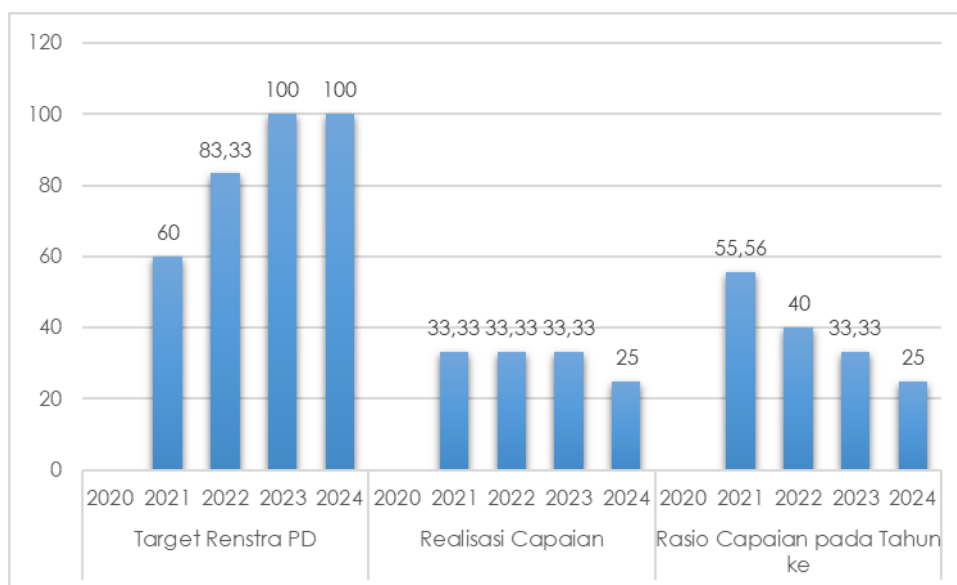
Berdasarkan target restra persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 60%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 23,33% menjadi 83,33%, pada tahun 2025 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 16,67% menjadi 100%, pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi tidak mengalami peningkatan atau penurunan.



Berdasarkan realisasi capaian persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 33,33%, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,33% menjadi 25%.

Berdasarkan rasio capaian persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 55,56%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 15,56% menjadi 40%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 6,67% menjadi 33,44% dan pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 8,33% menjadi 25%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi dapat dilihat pada gambar 2.32.



Gambar 2.32
Persentase Ketersediaan Gedung RS Tipe D pada tahun 2024
Dalam Kondisi Baik Dan Berfungsi

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.5.



Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
1.	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				70,00	72,00	74,00	66.19										
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			N/A	78,80	80,00	82,00	70.00	N/A	79,23	80	57,19	69,25	N/A	100,55	99,04	69,74	98,92
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat			N/A	92,00	92,50	93,00	90.00	N/A	91,78	93,54	96,63	84,68	N/A	99,76	101,12	103,90	94,09
4.	Optimalisasi Disiplin Aparatur				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
5.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
6.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
7.	Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
8.	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																		
9.	Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran				46,71	52,36	57,45	39,48										
10.	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran			N/A	46,71	52,36	57,45	39,48	N/A	21,66	28,49	42,40	36.21	N/A	46,36	54,42	73,81	91.72
11.	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak							99.58					99,63					100,05
12.	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi							2.84					1,8					63,38



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Aman																	
Program Pengembangan Perumahan																		
13.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau				13,30	15,97	18,65	6,26		5,99	6,01	23,60	6,26		45,07	37,62	126,59	100
14.	Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota				100	100	100	100		0	100	100	100		0	100	100	100
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh																		
15.	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan							79,84					74					92,69
Program Kawasan Permukiman																		
16.	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan				66,76	84,41	100	1,64		68,32	68,32	100	1,64		102,33	80,93	100	100
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan																		
17.	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot				100	100	100	33,33		0	0	N/A	0		0	0	N/A	0
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan																		
18.	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah				63,00	81,00	100	38,93		16,55	9,50	19,38	33		26,28	11,72	19,38	84,77
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																		
19.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum				22,25	23,22	24,14	24,72		23,05	22,41	23,23	24,72		103,58	96,53	74,14	100
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)																		
20.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU				33,19	36,72	40,23	43,75		28,99	28,49	38,28	43,75		87,37	54,42	95,15	100
21.	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum				6,50	6,70	6,91	7,13		6,28	6,01	6,37	7,13		96,66	89,78	92,20	100
Program Penataan Bangunan Gedung																		
22.	Persentase ketersediaan				82,98	93,62	100	35,71		46,81	74,47	27,66	42,55		56,41	79,55	27,66	119,



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi																	16
23.	Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik				61,27	79,84	100	42,27										
24.	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik			N/A	61,27	79,84	100	42,27	N/A	11,49	12,14	24,86	44,69	N/A	18,76	15,20	24,86	105,74
Program Pengelolaan Pendidikan																		
25.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik				66,67	83,33	100	20,69		22,57	13,19	18,75	23,95		33,85		18,75	115,80
26.	Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik				57,14	76,19	100	36,11		11,90	23,21	45,83	38,69		20,83		45,83	107,15
27.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik				60,00	80,00	100	70,00		0	0	100	71,42		0		100	102,04
28.	Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik				55,00	76,67	100	58,00										
29.	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik			N/A	55,00	76,67	100	58,00	N/A	28,33	31,67	25,00	23,21	N/A	51,52	41,30	25,00	40,02
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																		
30.	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)				50,00	70,00	100	16,00		23,33	30,00	16,67	21,42		46,67	42,86	16,67	133,93
31.	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi				60,00	83,33	100	100		33,33	33,33	33,33	25,00		55,56	40,00	33,33	25,00

Sumber : LKIP 2021, LKIP 2022, LKIP 2023 dan LKIP 2024



Realisasi capaian persentase peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,81 % menjadi 57,19 % dan mengalami peningkatan kembali sebesar 12,06 % menjadi 69,25%.

Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 sebesar 96,63 % dan mengalami penurunan sebesar 11,95 % menjadi 84,68 %. Dilihat dari target renstra tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat sebesar 90.00%, dapat dilihat bahwa realisasi capaian tahun 2024 belum mencapai target renstra tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja Disperkimtan Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan signifikan pada aspek fisik dan pelayanan, namun juga mencerminkan tantangan dalam aspek perencanaan indikator dan target tahunan yang belum sepenuhnya lengkap. Ketidakterisian target pada beberapa indikator menyebabkan evaluasi capaian tidak dapat dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, perencanaan indikator dan target di Renstra 2025–2029 perlu disusun secara lebih komprehensif dan realistis, agar kinerja perangkat daerah dapat terukur dan akuntabel.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Disperkimtan meliputi:

1. **Masyarakat Kota Bekasi**, khususnya:
 - a. Layanan pemakaman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - b. Warga yang tinggal di kawasan kumuh;
 - c. Penghuni rusunawa; dan
 - d. Pengguna dan air limbah domestik.
2. **Perangkat Daerah** (dalam hal penyediaan data, koordinasi RTRW/RDTR, dan penataan bangunan gedung milik pemerintah).
3. **Pengembang, asosiasi perumahan, dan pihak swasta** yang bermitra dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja lima tahunan serta dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Tahun 2024, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, meliputi:

1. Belum adanya database yang menampilkan data sarana dan prasarana pendidikan secara berkala dan *update* dan terbatasnya pendanaan.



2. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk perkelurahan.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang representatif;
4. Banyaknya sarana pendidikan, sarana yang rusak;
5. Pembangunan belum mencapai target dikarenakan masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik;
6. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED;
7. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED;
8. Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing-masing RSUD Type D;
9. Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D;
10. Belum tersedianya lahan di beberapa kecamatan untuk pembangunan RSUD Type D;
11. Realisasi capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik tahun 2024 sebesar 23,21 % belum mencapai target renstra yaitu sebesar 58%;
12. Akses terhadap air minum perpipaan masih dibawah target Nasional;
13. Perlunya pendataan wilayah kumuh ulang dan Anggaran yang kurang maksimal;
14. Belum tercapainya target Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 79,84 % sedangkan realisasi capaian persentase luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan sebesar 74% perlu adanya peningkatan untuk mencapai target renstra;
15. Belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya;
16. Pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah;
17. Realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman tahun 2024 belum mencapai target restra yaitu sebesar 1,8 % sedangkan target renstra sebesar 2,84%;
18. Realisasi capaian cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada program pengelolaan dan pengembangan system air limbah belum mencapai target renstra yaitu sebesar 36,21 % sedangkan target renstra sebesar 39,48%;
19. Penyediaan perumahan untuk masyarakat terkendala ketersediaan lahan yang makin sulit didapatkan;
20. Potensi konflik kepemilikan lahan di Kota Bekasi masih terus terjadi berupa tumpang tindih hak atas tanah;



21. Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
22. Belum optimalnya dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
23. Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *good governance*;
24. Kurangnya sosialisasi biaya / tarif layanan melalui website maupun media sosial yang lain;
25. Kurang terpublikasinya persyaratan pelayanan dengan jelas;
26. Kurangnya sosialisasi alur pelayanan di UPTD;
27. Belum tercukupinya kebutuhan operasional penunjang pegawai Aparat;
28. Realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 sebesar 69,25% belum mencapai target renstra yaitu sebesar 70.00%;
29. Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 84,68% belum mencapai target renstra yaitu 90,00%; dan
30. Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar.

2.2.2 Isu Strategis

Permasalahan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar. Sementara, sisi dinamis dari persoalan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari.

Isu strategis Disperkimtan Kota Bekasi dirumuskan dengan mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, khususnya Misi 1 serta arah kebijakan pembangunan kota layak huni dan pelayanan publik perkotaan dan keterkaitan isu strategis Kota Bekasi dengan rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Isu-isu berikut perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan yaitu:



1. **Peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur permukiman dan PSU dasar** di wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk.
2. **Percepatan penanganan kawasan kumuh berbasis kawasan prioritas**, termasuk integrasi dengan program nasional.
3. **Penguatan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi aman**, termasuk optimalisasi UPTD PALD dan pembangunan infrastruktur IPAL komunal.
4. **Peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)** melalui bantuan pembangunan rumah dan intervensi rumah tidak layak huni.
5. **Reformasi tata kelola pertanahan dan aset daerah** melalui penertiban legalitas, pemutakhiran data digital, dan penyusunan database berbasis spasial.
6. **Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi internal**, dengan fokus pada peningkatan AKIP, penguatan evaluasi kinerja, dan survei kepuasan layanan.
7. **Adaptasi terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan permukiman ramah lingkungan**, terutama di wilayah dengan risiko banjir dan keterbatasan ruang terbuka hijau.



Tabel 2.6
Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi

Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
1. Belum adanya database yang menampilkan data sarana dan prasarana pendidikan secara berkala dan update dan terbatasnya pendanaan 2. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan 3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prsarana Kesehatan yang Representatif 4. Banyaknya sarana pendidikan, sarana yang rusak 5. Pembangunan belum mencapai target dikarenakan masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik 6. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED 7. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED 8. Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing-masing RSUD Type D 9. Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D 10. Belum tersedianya lahan di beberapa kecamatan untuk pembangunan RSUD Type D 11. Realisasi capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik tahun 2024 sebesar 23,21 % belum mencapai target renstra yaitu sebesar 58% 12. Akses terhadap air minum perpipaan masih dibawah target Nasional	1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tanggung dan berkelanjutan 2. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk 4. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			layanan infrastruktur dasar	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur permukiman dan PSU dasar di wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk
1. Perlunya pendataan wilayah kumuh ulang dan Anggaran yang kurang maksimal			pergeseran struktur kelas masyarakat	kemiskinan dan ketimpangan	Percepatan penanganan kawasan kumuh berbasis kawasan prioritas,



Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
2. Belum tercapainya target Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 79,84 % sedangkan realisasi capaian Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan sebesar 74% perlu adanya peningkatan untuk mencapai target renstra					termasuk integrasi dengan program nasional
1. Belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya 2. Pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah 3. Realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman tahun 2024 belum mencapai target restra yaitu sebesar 1,8 % sedangkan target renstra sebesar 2,84% 4. Realisasi capaian cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada program pengelolaan dan pengembangan system air limbah belum mencapai target renstra yaitu sebesar 36,21 % sedangkan target renstra sebesar 39,48%				layanan infrastruktur dasar	Penguatan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi aman, termasuk optimalisasi UPTD PALD dan pembangunan infrastruktur IPAL komunal
Penyediaan perumahan untuk masyarakat terkendala ketersediaan lahan yang makin sulit didapatkan			pergeseran struktur kelas masyarakat	kemiskinan dan ketimpangan	Peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan pembangunan rumah dan intervensi rumah tidak layak huni
1. Potensi konflik kepemilikan lahan di Kota Bekasi masih terus terjadi berupa tumpang tindih hak atas tanah 2. Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum		demografi global	kualitas SDM	Tata kelola pemerintahan	Reformasitata kelola pertanahan dan aset daerah melalui penertiban legalitas, pemutakhiran data digital, dan penyusunan database berbasis spasial



Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
1. Belum optimalnya dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2. Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> . 3. Kurangnya sosialisasi biaya / tarif layanan melalui website maupun media sosial yang lain 4. Kurang terpublikasinya persyaratan pelayanan dengan jelas 5. Kurangnya sosialisasi alur pelayanan di UPTD 6. Belum tercukupinya kebutuhan operasional penunjang pegawai Aparat 7. Realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 sebesar 69,25% belum mencapai target renstra yaitu sebesar 70.00% 8. Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 84,68% belum mencapai target renstra yaitu 90.00%			Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah		Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi internal, dengan fokus pada peningkatan AKIP, penguatan evaluasi kinerja, dan survei kepuasan layanan
Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar		Dampak perubahan iklim global	krisis lingkungan	layanan infrastruktur dasar	Adaptasi terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan permukiman ramah lingkungan, terutama di wilayah dengan risiko banjir dan keterbatasan ruang terbuka hijau

Sumber: dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

BAB III

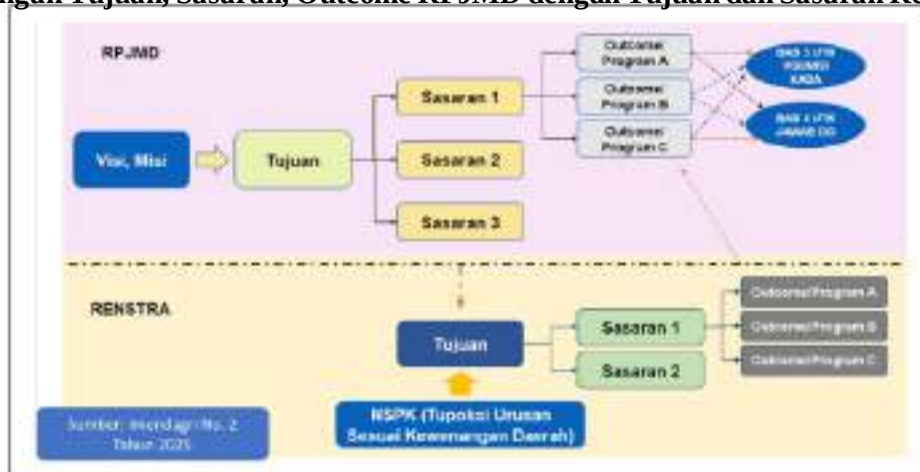
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISPERKIMTAN KOTA TAHUN 2025-2029

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mendefinisikan Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Untuk sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sasaran daerah tersebut didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan visi, misi Wali Kota Bekasi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 3.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Outcome RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD





1. Visi Kota Bekasi

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayaannya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

2. Misi Kota Bekasi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, meliputi:

a. **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai**

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih,



penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.

c. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

d. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

e. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

3. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2



Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 bahwa misi, tujuan dan sasaran yang relevan dan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tahun 2025-2029 adalah **Misi 1 yaitu “Meningkatkan Jangkauan Dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan Yang Semakin Memuaskan Dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai”** dengan **Tujuan** Terwujudnya Tata Kota



Bekasi yang berestetika disertai dengan infrastuktur yang modern dan lestari **dengan** indicator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sedangkan **Sasaran** yang ingin di capai yaitu Terwujudnya estetika kota disertai dengan infrastuktur yang moden dan indikatornya dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

Perumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025-2029 selain didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 juga didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka rumusan tujuan Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

“MEWUJUDKAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN GEDUNG MODERN YANG INKLUSIF SERTA BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang meliputi:

1. Mewujudkan peningkatan kualiss pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan indikator sasaran meliputi;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik; dan
 - Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU dengan indikator sasaran meliputi:
 - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah dengan indikator sasaran meliputi:
 - Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi.
4. Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum dengan indikator sasaran meliputi:
 - Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan pertanahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Dan Indiaktor Kinerja Dinas Perkintan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi	Misi I Kota Bekasi	Tujuan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Indikator Tujuan RPJMD 2025-2029	Sasaran RPJMD 2025-2029	Indikator Sasaran	Tujuan dan Sasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target					
								Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera	Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai	Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastrutur Modern dan Lestari	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Pilar Infrastruktur (IDSD)	Tujuan:"Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan	Indeks Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50,95%	58,52%	62,96%	66,16%	69,24%	71,88%
						Sasaran 1: Mewujudkan peningkatan kualiss pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	86.00	87.50	88.00	89.50	90.00	92.00
							Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	70,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50
						Sasaran 2: Meningkatkan akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	45,05%	47,48%	50,46%	53,02%	55,70%	58,34%
						Sasaran 3: Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah	Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi	39,41%	56,46%	63,25%	67,64%	71,09%	74,45%
						Sasaran 4: Meningkatkan akses lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	68,38%	71,60%	75,17%	77,83%	80,93%	82,85%

Sumber: Hasil Analisis Dan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Program Dan Indiator Kinerja Dinas Perkimtan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasarana	Program	Indikator Program		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			Baseline	Target	Target	Target	Target	Target	Target
TUJUAN: Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan									
Sasaran 1 : Mewujudkan peningkatan kualiss pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daaerah dengan Penganggaran	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,39	100	100	100	100	100	100
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	85,35	85,6	85,85	86	86,25	86,5	86,75
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99.31	99.58	99.63	99.74	99.8	99.89	100
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	1.8	2	2.5	5	5	5	5
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100	100	100
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaani	25	21,84	37,47	53,10	68,74	84,37	100



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Tujuan dan Sasarana	Program	Indikator Program		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			Baseline	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	1,64	3,28	4,92	6,56	8,2	9,84	11,48
	program pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum	Presentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota	23	25,26	25,78	28,5	30,03	32,52	34,78
	Program Peningkatan Prsarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	4 3,75	47,26	50,78	54,98	59,18	63,38	67,58
	program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	35,71	40,6	50,89	63,89	68,56	71,5	73
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,69	52,09	60	65,5	70,35	75	80,35
	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	23,21	25,54	58,5	60,35	64	66,76	70
Sasaran 4: Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaia Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	33	36,76	43,2	50,34	55,65	61,85	65,7
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dinas Perkimtan



3.2 STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah diperlukan strategi. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selaras dengan visi Kota Bekasi " **Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera** ", maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menyusun strategi yang dijabarkan dalam lima tahapan yang dituangkan pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Peningkatan akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan	• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital • Implementasi teknologi untuk transparansi, otomatisasi, dan pengelolaan kinerja Disperkimtan agar lebih efektif dan efisien	Peningkatan inovasi dan teknologi dalam Pelayanan Publik dan peningkatan akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan	• Penggunaan teknologi dan inovasi, penyederhanaan prosedur, penetapan standar pelayanan Publik; • Peningkatan Kinerja Dinas Perkimtan yang transparan dan akuntabilitas	Keberlanjutan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan peningkatan Kinerja Dinas Perkimtan yang transparan dan akuntabilitas
Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Kualitas Layanan PSU Yang Berkelanjutan				
• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat • Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang;	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana



Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	Peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);
Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan				
- Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran - Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan - Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	- Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran - Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan - Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	- Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran - Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan - Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	- Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran - Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan - Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	Keberlanjutan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran, Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan dan peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan
Peningkatan Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum				
- Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	- Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	- Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	- Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Keberlanjutan Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

3.3 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan arah kebijakan RPJMD selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Arah kebijakan yang dirumuskan guna pencapaian target-target yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1. Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman: a. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk: • Menciptakan rumah yang layak huni; • mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan • meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. b. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: • kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; • keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan • ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 2. RTRW Kota Bekasi Arahan kebijakan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan RTRW Kota Bekasi meliputi: a. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, dengan strategi: • mengembangkan kawasan peruntukan perumahan; • mengarahkan kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal; • menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;	Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur, dengan arah kebijakan meliputi: 1. Perbaikan kualitas rumah dengan Program Kawasan Permukiman 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui program; a. Program Kawasan Permukiman; b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Penanganan bencana di kawasan permukiman melalui program: a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;	1. Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang dengan arah kebijakan meliputi: a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha; b. Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat c. Peningkatan Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar d. Pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi keterbatasan lahan dan untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh. e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni f. Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh g. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh h. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota i. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha j. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru k. meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau l. memberikan kemudahan akses bagi MBR terhadap perumahan layak huni melalui berbagai program dan kebijakan.



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
• meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal, seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan; • mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan • mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan • mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat Sewage Treatment Plant (STP) komunal b. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, dengan strategi: • meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih; • meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan • meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi. c. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, dengan strategi: • mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan • mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		m. Pengembangan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh MBR baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni; n. Pengembangan berbagai skema pembiayaan perumahan bersubsidi, 2. Strategi peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dengan arah kebijakan meliputi; a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian b. Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) c. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) d. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik f. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu g. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat h. peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak dan aman i. Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu terus didukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik, termasuk pengelolaan air limbah; j. peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah dalam rencana pembangunan daerah



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		k. meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan limbah 3. Strategi Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan dengan arah kebijakan meliputi: a. Pembangunan bangunan gedung Pendidikan b. Rehabilitasi Sedang/Berat Banguna Gedung Pendidikan Pembangunan bangunan gedung Kesehatan c. Rehabilitasi Sedang/Berat Banguna Gedung Kesehatan d. Pembangunan bangunan gedung pemerintahan e. Rehabilitasi Sedang/Berat Banguna Gedung pemerintahan 4. Strategi Peningkatan Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum dengan arah kebijakan meliputi: a. Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil analisis Tahun 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

4.1 PROGRAM DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tujuan yaitu;

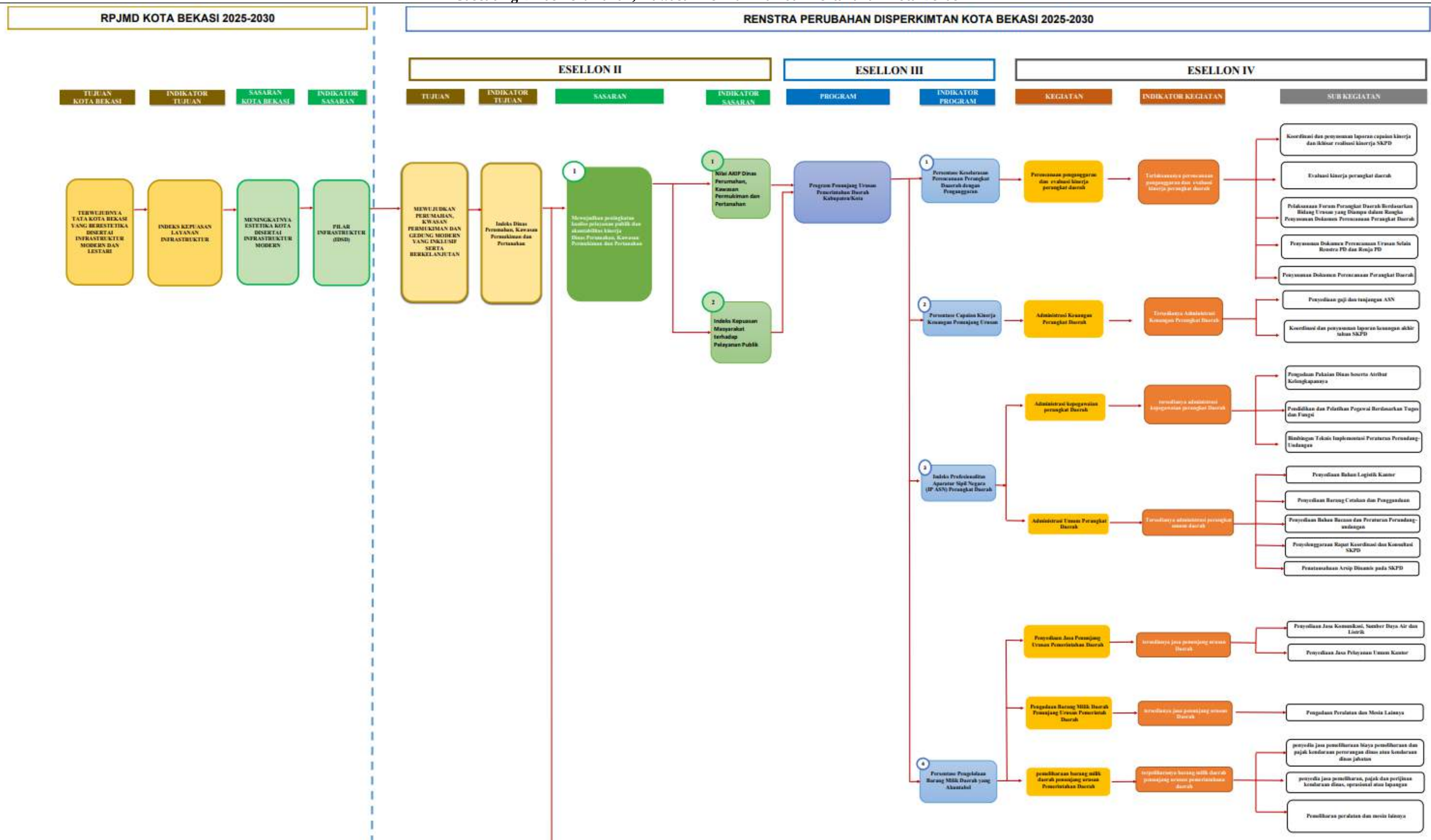
“MEWUJUDKAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN GEDUNG MODERN YANG INKLUSIF SERTA BERKELANJUTAN”.

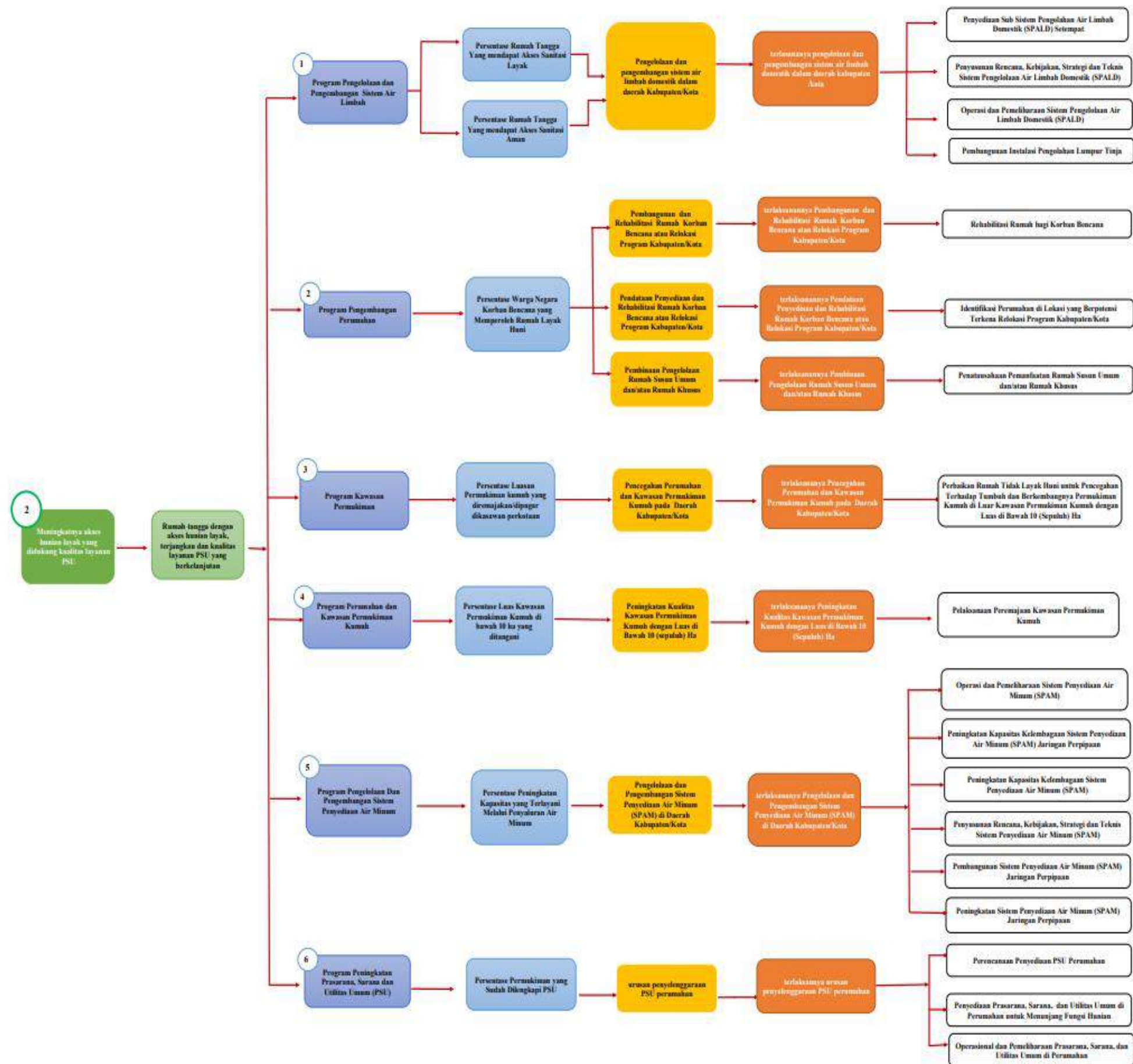
Dengan Indikator Tujuan “Indeks Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sedangkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu 1) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dengan a) Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, b) indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. 2) Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU dengan indikator Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan; 3) Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah dengan indikator sasaran Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi; 4) Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum dengan indikator sasaran Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

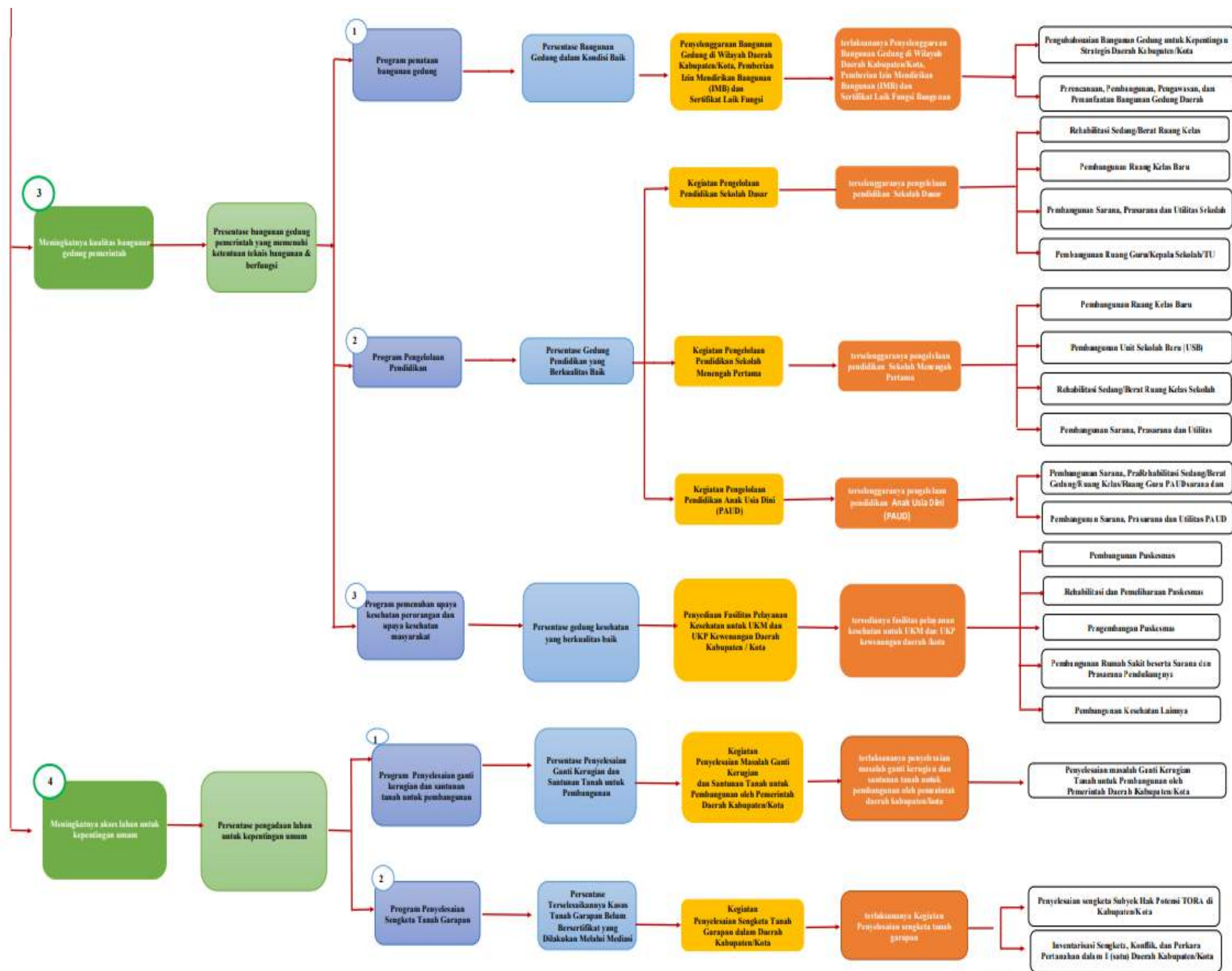
Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, output, Program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomleklatur yang diatur dalam peraturan dalam negeri adapun kerangka program/kegiatan/sub kegiatan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1
Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi









4.1.1 Uraian Program Dan Kegiatan

Dalam rangka perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran.

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selama lima tahun, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah guna memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah program urusan pemerintahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik maupun air limbah sejenis.
3. Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, khususnya melalui pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh, agar tercipta lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.
5. Program Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan kawasan permukiman, baik di perkotaan, melalui penyediaan, pembangunan, penataan, serta pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar permukiman.
6. Program pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum



Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan layanan air minum bagi masyarakat, baik di kawasan perkotaan

7. Program Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk menyediakan, meningkatkan kualitas, serta menjaga keberlanjutan prasarana, sarana, dan utilitas dasar pada kawasan perumahan dan permukiman agar layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan.

8. program penataan bangunan gedung

Program Penataan Bangunan Gedung adalah program urusan pemerintahan bidang bangunan gedung yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, layak huni, aman, nyaman, serasi, selaras dengan lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

9. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan adalah program urusan pemerintahan bidang bangunan gedung yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen, dan layanan administrasi pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

10. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah program urusan pemerintahan bidang bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang menyeluruh, berjenjang, merata, bermutu, dan terjangkau, baik pada tingkat individu maupun tingkat populasi.

11. Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan adalah program urusan pemerintahan bidang pertanahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kelancaran pelaksanaan pembangunan yang memerlukan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan santunan kepada pihak yang berhak atas tanah, bangunan, tanaman, maupun benda lain yang berkaitan dengan tanah.

12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan adalah program urusan pemerintahan bidang pertanahan yang bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul akibat penguasaan dan pemanfaatan tanah garapan oleh



masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam pengelolaan tanah.

Untuk mengurai lebih lanjut mengenai program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan maka diuraikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
 - d. Administrasi umum perangkat daerah.
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah .
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota .
 - b. Pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.
 - c. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Kawasan Permukiman
 - a. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
6. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan.
8. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota pemberi persetujuan bangunan gedung (PBG))dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
9. Program Pengelolaan Pendidikan



- a. Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar.
 - b. Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama.
 - c. Kegiatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten / Kota.
 11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Perumusan kegiatan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, seperti digambarkan pada tabel 4.1.

4.1.2 Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi untuk periode tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta seluruh perubahannya. Struktur tersebut menjadi dasar dalam perencanaan kinerja Perangkat Daerah (PD) secara sistematis, akuntabel, dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2029 (tahun transisi) tetap dimasukkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menjembatani transisi perencanaan ke periode berikutnya. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan tahun 2029 diposisikan sebagai bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun tersebut.

Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.2.



Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
1. Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025–2045. 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024–2044. 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2024–2044. 5. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029; Misi, tujuan dan sasaran yang relevan dan menjadi dasar pertimbangan	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang efektif dan transparan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik; - Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
					Outcome 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran
					Kegiatan: Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
					Sub Kegiatan: • Evaluasi kinerja perangkat daerah;	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					• Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
					• Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
					Outcome 2 : Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
perumusan tujuan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tahun 2025-2029 meliputi: - Misi: Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai; - Tujuan Kota Bekasi : Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari; - Sasaran: Meningkatkan estetika kota disertai infrastruktur modern					Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					• Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Outcome 3 : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah
					Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat Daerah;	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat Daerah
					Sub Kegiatan: • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
					• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat umum daerah



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan
					• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel
					Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediannya jasa penunjang urusan daerah
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					Kegiatan:	Tersedianya jasa penunjang urusan Daerah



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
					Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
					• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Terwujudnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Layak
					Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Aman
						Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak
						Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan ; Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
					Sub Kegiatan ; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Sub Kegiatan ; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Sub Kegiatan ; Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					PROGRAM: PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
					Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
						penyediaan rumah yang layak huni
					Kegiatan 1: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksanannya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana program kabupaten/kota yang Terehabilitasi
					Kegiatan 2: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya pendataan, rehabilitasi, penyediaan dan rumah korban bencana atau relokasi program kota
					Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Kegiatan 3: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
					Sub Kegiatan: Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
					ROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Outcome: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani
					Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bekasi
					PROGRAM: KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani
					Outcome: Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaan
					Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
					PROGRAM:	presentase peningkatan kapasitas yang terlayani



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	melalui penyaluran air minum
					Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum
					Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					PROGRAM: PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU
					Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU
					Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	terlaksannnya urusan penyelenggaraan PSU perumahan
					Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Sub Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
						UPTD Pemakaman
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Terwujudnya Kualitas bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	PROGRAM: PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik
					Outcome: Meningkatkan kualitas bangunan gedung (updet perkimtan)	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik
					Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
					Sub Kegiatan: • Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					• Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
					PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik
					Outcome: Meningkatnya kualitas gedung pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik
					Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar:	terselenggaranya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar
					Sub Kegiatan : • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	
					• Pembangunan ruang kelas baru	
					• Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					• Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terselenggaranya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Sub Kegiatan :	•



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					• Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					• Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					• Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					• Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	
					Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	terselenggaranya pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
					Sub Kegiatan: • Pembangunan Sarana, PraRehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sarana dan Utilitas	
					• Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik
					Outcome : Meningkatnya kualitas gedung kesehatan	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik
					Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
					Sub Kegiatan: • Pembangunan Puskesmas	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					• Pengembangan Puskesmas	
					• Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					• Pembangunan Kesehatan Lainnya	
		Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Terwujudnya akses lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	PROGRAM: PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
					Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (updet perkim)	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
					Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
					Subkegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					PROGRAM: PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi
					Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Penyelesaian sengketa tanah garapan
					Sub Kegiatan: • Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) tahun Daerah Kabupaten/Kota
					• Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025



Tabel 4.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan															
			Program/Outcome/Kegiatan/ SubKegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Visi: Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera																
	Misi: Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai;																
	Tujuan Kota Bekasi: Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastrutur Modern dan Lestari																
1	Sasaran: Meningkatkan estetika kota disertai infrastruktur modern	Tujuan: Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan															
		Sasaran I : Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerjaDinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.025.688.800		18.183.458.000		21.086.561.000		21.091.561.000		21.246.561.000		21.301.561.000
			Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	65.930.000	100	90.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000
			Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	65.930.000	100%	90.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	115.000.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50 Laporan	15.000.000	50 Laporan	15.000.000	50 Laporan	15.000.000	50 Laporan	15.000.000	50 Laporan	15.000.000	50 Laporan	15.000.000
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	-	-	-	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	50.930.000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1 Berita Acara	25.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	50.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
			Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,39	100	21.029.015.440	100	17.833.458.000	100	19.453.561.000	100	19.453.561.000	100	19.453.561.000	100	19.453.561.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	18.213.972.000	100%	16.078.458.000	100%	18.213.972.000	100%	18.213.972.000	100%	18.213.972.000	100%	18.213.972.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.296 orang/bulan	3.388 orang/bulan	18.198.972.000	3.388 orang/bulan	16.063.458.000	3.388 orang/bulan	18.198.972.000	3.388 orang/bulan	18.198.972.000	3.388 orang/bulan	18.198.972.000	3.388 orang/bulan	18.198.972.000			



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000
			Outcome: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	85,35	85,6	395.000.000	85,85	0	86	660.000.000	86,25	665.000.000	86,5	670.000.000	86,75	675.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat Daerah	100%	100%	595.000.000	100%	595.000.000	100%	660.000.000	100%	665.000.000	100%	670.000.000	100%	675.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	10 Orang	45.000.000	10 Orang	60.000.000	10 Orang	65.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	75.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	181 Orang	200.000.000	181 Orang	200.000.000	181 Orang	250.000.000	181 Orang	250.000.000	181 Orang	250.000.000	181 Orang	250.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat umum daerah	100%	100%	895.225.000	100%	635.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000	100%	665.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	510.225.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000
			Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100	535.743.360	100	260.000.000	100	858.000.000	100	858.000.000	100	908.000.000	100	958.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	1.427.824.548	100%	1.120.000.000	100%	1.547.824.548	100%	1.547.824.548	100%	1.547.824.548	100%	1.547.824.548
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.427.824.548
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Daerah	100%	100%	187.743.360	100%	200.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	26 Unit	187.743.360	25 Unit	200.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	398.000.000	100%	260.000.000	100%	658.000.000	100%	658.000.000	100%	658.000.000	100%	658.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	46 Unit	298.000.000	46 Unit	150.000.000	46 Unit	298.000.000	46 Unit	298.000.000	46 Unit	298.000.000	46 Unit	298.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	50.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000
2	Sasaran: Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Tujuan : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan															



		Sasaran II : Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					3.223.350.640		1.387.620.800			1.459.499.557			1.543.566.732			1.622.597.349			1.709.568.567
			Outcome: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	1,64	3,28	3.223.350.640	4,92	1.387.620.800	6,56	1.459.499.557	8,2	1.543.566.732	9,84	1.622.597.349	11,48	1.709.568.567					
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																		
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bekasi		130	2.886.000.000	60	1.200.000.000	120	Rp 2.400.000.000	120	Rp 2.400.000.000	120	Rp 2.400.000.000	120	Rp 2.400.000.000					
				Biaya Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan		36	127.650.640	36	139.660.000	36	145.000.000	36	145.000.000	36	145.000.000	36	145.000.000					
				Sosialisasi Rutilahu Kota Bekasi		1	120.700.000	1	6.840.000	12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000					
				Dan lain-lain		1	54.000.000	1	21.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000					
				Efisiensi				1	120.800													
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3.360.019.173		2.750.019.173		2.892.470.166		3.059.076.448		3.215.701.162		3.288.062.744					
			Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	1.110.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000					
				Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	6,26	6,26	2.250.019.173	6,26	2.250.019.173	6,26	2.250.019.173	6,26	2.250.019.173	6,26	2.250.019.173	6,26	2.250.019.173					
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	-	100	100.000.000	100	242.450.993	100	309.057.275	100	415.681.989	100	438.043.571					
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana program kabupaten/kota yang Terehabilitasi		Unit Rumah																
				Pembangunan Rutilahu Korban Bencana		25 Unit Rumah	555.000.000	19 Unit Rumah	400.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000					
				Dan lain lain				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000					
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
				Penyusunan Dokumen Identifikasi Perumahan dilokasi Rawan Bencana dan Relokasi Program Kota Bekasi	-	-	0	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.019.173	1 Dokumen	2.250.019.173	1 Dokumen	2.250.019.173	1 Dokumen	2.250.019.173	1 Dokumen	2.250.019.173	1 Dokumen	2.250.019.173					
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		500 Liter	7.000.000	500 Liter	7.000.000	500 Liter	7.000.000	500 Liter	7.000.000	500 Liter	7.000.000	500 Liter	7.000.000								



				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian		-	0	2 unit	7.764.000	-	-	-	-	-	-
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		241 buah	6927500	499 buah	11.382.000	241 buah	6.927.500	499 buah	11.382.000	241 buah	6.927.500
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		1 paket	750000	-	0	-	-	-	-	-	-
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		40 buah	7.360.000	48 buah	8.256.000	48 buah	8.256.000	48 buah	8.256.000	48 buah	8.256.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		430 buah	35.721.000	505 buah	47.782.000	430 buah	35.721.000	505 buah	47.782.000	430 buah	35.721.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		330 Buah	19.500.000	173 buah	19.890.000	330 Buah	42.485.000	173 buah	19.890.000	330 Buah	42.485.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		8 stel	6.000.000	4 pasang	556.000	8 stel	6.000.000	8 stel	6.000.000	8 stel	6.000.000
				Belanja Natura dan Pakan-Natura		540 galon	13.500.000	540 galon	15.660.000	540 galon	15.660.000	540 galon	15.660.000	540 galon	15.660.000
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		600 orang/hari	90.000.000	600 orang/hari	90.000.000	600 orang/hari	90.000.000	600 orang/hari	90.000.000	600 orang/hari	90.000.000
				Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000
				Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000	1200 orang/hari	180.000.000
				Belanja Tagihan Listrik		1 tahun	359.719.120	1 tahun	360.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	360.000.000
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000
				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		-	0	1 tahun	32.000.000	1 tahun	32.000.000	1 tahun	32.000.000	1 tahun	32.000.000
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		-	0	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000	1 tahun	1.500.000
				Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		-	0	1 tahun	1.800.000	1 tahun	1.800.000	1 tahun	1.800.000	1 tahun	1.800.000
				Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa		1 Paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	-	-	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		-	-	2 unit	49.088.000	-	-	-	-	-	Rp -
				Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		-	-	3 unit	15.375.000	-	-	-	-	-	Rp -
				Belanja Modal Personal Computer		-	-	2 unit	10.396.000	-	-	-	-	-	Rp -
				Belanja Modal Alat Penolong		-	-	1 unit	3.115.000	-	-	-	-	-	Rp -
				Belanja Modal Flat/Rumah Susun		1 paket	1.020.556.553	1 paket	993.455.173	1 paket	1.267.669.673	1 paket	1.073.749.173	1 paket	1.067.669.673
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			16.876.000.000		20.399.427.578		21.456.117.927		22.691.990.319		23.853.820.223
				Outcome: Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		25	29	16.876.000.000	33,92	20.399.427.578	40,48	21.456.117.927	48,68	22.691.990.319	58,52
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh											
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00



				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Jatiraden Kecamatan Pondok Melati			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Pekayon Jaya dan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan			1.155.450.000,00		1.261.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara			1.155.450.000,00		1.350.427.578		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Penataan Permukiman Kumuh Tematik Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih			1.155.450.000,00		1.561.000.000		2.277.487.500,00		2.280.820.833,00		2.284.987.500,00		2.289.154.167,00	
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Tematik			1.200.750.000,00		1.089.000.000		1.089.000.000		1.089.000.000		1.089.000.000		1.089.000.000	
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Tematik			1.200.750.000,00		1.089.000.000		1.089.000.000		1.089.000.000		1.089.000.000		1.089.000.000	
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			502.150.000,00				502.150.000,00		502.150.000,00		502.150.000,00		502.150.000,00	
				Konsultan Pengawasan Banprov Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Tematik			100.350.000,00											
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			21.458.850.000		45.827.719.399		43.468.494.212		45.972.279.479		48.326.060.188		50.916.337.014	
				Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99,31	99,58	7.458.850.000	99,63	4.667.650.000	99,74	23.468.494.212	99,8	24.972.279.479	99,89	26.326.060.188	100	27.916.337.014
					Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	1,8	2	14.000.000.000	2,5	41.160.068.399	5	20.000.000.000	5	21.000.000.000	5	22.000.000.000	5	23.000.000.000
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
					Pembangunan Tanki Septiktank Individual Perkotaan		150 unit	1.275.000.000	150 unit	1.275.000.000	200 unit	1.700.000.000,000	200 unit	1.700.000.000	200 unit	1.700.000.000,00	200 unit	1.700.000.000
					Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman								1 unit	10.000.000.000				
					Manajemen Konstruksi Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman								1 dokumen	600.000.000				
					Kedoteng				1 unit	100.000.000	2 unit	200.000.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000
				penyusunan rencana,kebijakan,strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)														
					Studi Kelayakan Pembangunan SPALD Terpusat skala Permukiman		1 dokumen	300.000.000										
					Dokumen Lingkungan Hidup SPALD Terpusat skala Permukiman		1 dokumen		1 dokumen	300.000.000								
Penyusunan DED SPALD Terpusat Skala Permukiman							1 dokumen	300.000.000.000										
Review Perencanaan Pembangunan IPLT Sumur Batu			65.000.000,00															



			operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)														
				Jasa Konsultan Pengawasan Septiktank		1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	50.350.000	1 dokumen	100.000.000,000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000
				Jasa Konsultan Perencanaan Septiktank				1 dokumen	50.350.000	1 dokumen	100.000.000,000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000
				Uang Transportasi Lokal		165 frekuensi	24.750.000	165 frekuensi	24.750.000	165 frekuensi	24.750.000,000	165 frekuensi	24.750.000	165 frekuensi	24.750.000	165 frekuensi	24.750.000
				Honorarium Narasumber/Pembahas		22 orang	18.000.000	22 orang	18.000.000	22 orang	18.000.000,000	22 orang	18.000.000	22 orang	18.000.000,00	22 orang	18.000.000
				Sosialisasi DAU dan Sanitasi Aman		1846 box	120.000.000	1846 box	120.000.000	1846 box	120.000.000,000	1846 box	120.000.000	1846 box	120.000.000	1846 box	120.000.000
				Gaji TFL DAU dan Sanitasi Aman		6 tfl	242.000.000	12 tfl	528.000.000	12 tfl	528.000.000,000	12 tfl	528.000.000	12 tfl	528.000.000,00	12 tfl	528.000.000
				Banner sosialisasi		17 paket	8.500.000,00	17 paket	8.500.000	17 paket	8.500.000,000	17 paket	8.500.000	17 paket	8.500.000	17 paket	8.500.000
				Fotocopy materi sosialisasi		42500 lembar	12.756.000,00	42500 lembar	12.756.000	42500 lembar	12.756.000,000	42500 lembar	12.756.000	42500 lembar	12.756.000	42500 lembar	12.756.000
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
				Rehabilitasi/Revitalisasi Pembangunan IPAL Komunal		3 unit	235.515.000	1 unit	100.000.000	2 unit	200.000.000,000	2 unit	200.000.000	1 unit	1.200.000.000,00	2 unit	200.000.000
				Konsultan Pengawasan Rehabilitasi/Revilitasi IPAL Komunal		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000,000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000
				Konsultan Perencanaan Rehabilitasi/Revilitasi IPAL Komunal		1 dokumen	50.000.000	1dokumen	50.000.000	1dokumen	50.000.000,000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000
				Pembangunan Ipal Gedung Teknis Bersama		1 unit	849.250.000										
				Konsultan Pengawasan Ipal		1 dokumen	74.650.000										
				Konsultan Perencanaan Ipal		1 dokumen	74.650.000										
				Pembangunan IPAL Wetland										1 unit	1.000.000.000		
				Review Perencanaan Ipal wetland										1 dokumen	70.000.000		
				Pengawasan Pembangunan Ipal Wetland										1 dokumen	100.000.000		
				Operasional IPAL Wetland	4 unit	4 unit	1.000.000.000,00	4 unit	1.000.000.000	4 unit	1.200.000.000,000	4 unit	1.200.000.000	5 unit	1.500.000.000	6 unit	1.500.000.000
				Pembangunan IPLT Sumur Batu tahap 1		1 unit	1.900.000.000,00										
				Konsultan Perencana Pembangunan IPLT Sumur Batu tahap 1		1dokumen	65.000.000,00										
				Konsultan Pengawas Pembangunan IPLT Sumur Batu tahap 1		1dokumen	66.400.000,00										
				AMDAL Pembangunan IPLT Sumur Batu		1 dokumen	1.000.000.000,00										
				Manajemen Konstruksi Pembangunan IPLT Sumur Batu				1 dokumen	1.000.000.000								
				Pembangunan IPLT Sumur Batu				150m3/hari	26.000.000.000								
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				25.877.444.600		16.735.330.800		16.915.762.932		3.874.705.781		4.073.090.717		4.291.408.380
			Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum	23	25,26	25.877.444.600	25,78	16.735.330.800	28,5	16.915.762.932	30,03	3.874.705.781	32,52	4.073.090.717	34,78	4.291.408.380
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Bangunan Instalasi SPAM Bantargebang (Jasa Konsultansi)		4 paket	110,70	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100



			Uji Laboratorium Kualitas Air Bersih		12 bulan	298	1 tahun	40	1 tahun	40	1 tahun	40	1 tahun	40	1 tahun	40
			pembuatan peta digital jaringan distribusi sistem penyediaan air minum		2 paket	100,35		0	2 paket	100,35		0		0	2 paket	0
			Pemeliharaan Bangunan Instalasi dan Bangunan Penunjang SPAM Lainnya		3 paket	202,15	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100
			Pemeliharaan Jaringan Perpipaan SPAM di Kec Bantargebang (Jasa Konsultansi)		4 paket	110,7	2 paket	48,9	2 paket	48,9	2 paket	48,9	2 paket	48,9	2 paket	48,9
			Pemeliharaan Jaringan Perpipaan SPAM di Kel. Ciketing Udik		3 paket	402,15	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100
			Pemeliharaan Jaringan Perpipaan SPAM di Kel. Cikiwul		3 paket	102,15	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100
			Pemeliharaan Jaringan Perpipaan SPAM di Kel. Sumur Batu		3 paket	202,15	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100
			Pemeliharaan Jaringan Sambungan Rumah(SR) SPAM Artesis		4 paket	402,15	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100
			Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal, dan Pompa SPAM		7 paket	312,85	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100	3 paket	100
			Operasional SPAM Artesis		1 paket	2210,33	1 paket	1526,39	1 paket	2370,95	1 paket	2384,95	1 paket	2384,95	1 paket	2384,95
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				161,48		161,48		161,48		161,48		161,48		161,48
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bimbingan Teknis Penyusunan RPAM Kota Bekasi		1 paket	66,54										
			Kegiatan Monitoring SPM Air Minum di Kota Bekasi		1 paket	94,94										
			Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Monitoring bidang SPAM				1 paket	161,48	1 paket	161,48	1 paket	161,48	1 paket	161,48	1 paket	161,48
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				425,7		528,15		1261,05		1261,05		1261,05		452,45
		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Penyusunan DED Jaringan Distribusi Utama SPAM Mustika Jaya		2 paket	75,35										
			Penyusunan DED Sistem Penyediaan Air Minum (n+1)		1 paket	250	1 paket	176,4	1 paket	176,4	1 paket	176,4	1 paket	176,4	1 paket	176,4
			Penyusunan Kebutuhan Nyata Air Bersih (Real Demand Survey) Sumber Dana DAK		1 paket	100,35	1 paket	100,35	1 paket	100,35	1 paket	100,35	1 paket	100,35	1 paket	100,35
			Monitoring SPAM Komunal				2 paket	75,7								
			Survey Calon Penerima Manfaat Pembangunan SPAM (n+1)				1 paket	175,7	1 paket	175,7	1 paket	175,7	1 paket	175,7	1 paket	175,7
			Survey Data Akses Air Minum di 12 Kecamatan						4 kecamatan	808,6	4 kecamatan	808,6	4 kecamatan	808,6		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1989,4										
			Pembangunan SPAM Yonif Tajimalela		6 paket	995,25										
			Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Langsung DIA. 250 MM Jl raya Jatimakmur-Jl Raya Kodau		5 paket	994,15										
			Pembangunan SPAM Mustika Jaya						3 paket	18637	2 paket	5355	2 paket	5946	1 paket	2576
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2932,25		504,28		13475		13475		1330		1330
			Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Jaringan Distribusi Bagi, Jaringan Distribusi Langsung DIA. 250 MM Gg Swadaya- Depan Puskesmas Jatimekar RT 04 RW 23, RT 03 RW 02, RT 03 RW 01		6 paket	1529,75										



				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat		40 SR	222,5										
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kelurahan Jatiluhur		40 SR	222,5										
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kelurahan Pejuang		40 SR	222,5										
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di RW 2 Kel.Medan Satria		40 SR	222,5										
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di RW 3 Kel.Medan Satria		40 SR	222,5										
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di RW 4 Kel.Teluk Pucung		40 SR	222,5										
				Perluasan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Kecamatan Jatiasih		13 SR	67,5										
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Perumahan BTR di RT 6 RW 15 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya				19 SR	99,99								
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Perumahan Bumi Dirgantara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatisasih				74 SR	404,29								
				Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)						2695	13475	2695	13475	266	1330	266	1330
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			BKK DKI Jakarta	Pembangunan Reservoir SPAM Bantargebang		10 paket	13252,09										
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				80.780.028.878		66.882.239.600		70.346.739.611		74.398.711.813		78.207.925.858		79.772.084.375
			Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	43,75	47,26	80.780.028.878	50,78	66.882.239.600	54,98	70.346.739.611	59,18	74398711813	63,38	78.207.925.858	67,58	79.772.084.375
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	terlaksannya urusan penyelenggaraan PSU perumahan													
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
				Jasa Konsultansi Penyusunan DED Kegiatan PSU		12	1.225.800.000	12	Rp 1.209.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.200.000.000
				Jasa Konsultan Perencanaan Peningkatan PSU dengan Kodim 0507		1	Rp 100.750.000	1	Rp 100.750.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000
				Jasa Konsultan Perencanaan Peningkatan PSU P2WKSS				1	Rp 100.750.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000
				Analisa Harga Satuan		1	100.350.000			1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000
				Update Sistem Aplikasi Verifikasi Lahan TPU		1	100.350.000										
				Jasa Konsultan Perencanaan Peningkatan Penataan Kampung Tematik		1	Rp 102.150.000										
				Dan lain lain						1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
				Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan PSU (APBD Murni)		12	Rp 1.204.200.000	12	Rp 1.209.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.200.000.000	12	Rp 1.200.000.000
				Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan PSU (APBD Murni Pekerjaan Lelang)				3	Rp 302.250.000	3	Rp 300.000.000	3	Rp 300.000.000	3	Rp 300.000.000	3	Rp 300.000.000



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

				Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan PSU P2WKSS				1	Rp 100.750.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000
				Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan PSU dengan Kodim 0507		1	Rp 102.150.000	1	Rp 100.750.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000
				Peningkatan PSU di Kota Bekasi		1	Rp 5.623.350.000	1	Rp 1.411.600.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000
				Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Kodim 0507		1	Rp 2.506.150.000	1	Rp 2.507.650.000	1	Rp 2.500.000.000	1	Rp 2.500.000.000	1	Rp 2.500.000.000
				Program Peningkatan PSU P2WKSS				1	Rp 607.650.000	1	Rp 600.000.000	1	Rp 600.000.000	1	Rp 600.000.000
				Penataan Kawasan Alun-alun Kota Bekasi		1	Rp 5.011.550.000	1	Rp 10.204.050.000						
				PHL Surveyor dan Drafter		6	Rp 275.222.160								
				Pendampingan Banprov		1	Rp 102.150.000								
				Penataan kampung Tematik di Kota Bekasi		1	Rp 1.006.150.000								
				Dan lain lain						1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000
			Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	-	Rp -	3 Lokasi	Rp 6.500.000.000	3 Lokasi	Rp 7.500.000.000	3 Lokasi	Rp 7.500.000.000	3 Lokasi	Rp 7.500.000.000
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya											
				Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian											
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor											
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
				Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya											
				Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)											
				Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Alat Bantu-Pompa											
				Belanja Peralatan dan Mesin- Komputer-Komputer Unit- Personal Computer											
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
				Belanja Tagihan Listrik											
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan											
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan											
				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
				Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN											
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural											
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan											
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan											



				Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga												
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus												
				Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu												
				Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran												
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer												
				Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya												
				Belanja Modal Jalan Kota												
				Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor												
				UPTD PEMAKAMAN			6.121.596.000		6.500.000.000		7.499.187.430		7.499.187.430		7.499.187.430	7.499.187.430
				Bahan Bakar Pelumnas UPTD Pemakaman												
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pertalite)			170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	170.000.000
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Solar)			39.440.000		39.494.000		39.494.000		39.494.000		39.494.000	39.494.000
				Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya												
				Obat Pembasmi Rumput			195.000.000		262.500.000		238.875.000		238.875.000		238.875.000	238.875.000
				Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)												
				Baju Seragam Kerja Lapangan			28.222.000		32.877.000		32.877.000		32.877.000		32.877.000	32.877.000
				kaos Seragam Kerja Lapangan					18.954.000		18.954.000		18.954.000		18.954.000	18.954.000
				Sepatu Boots Karet			14.832.000		16.848.000							
				Jas Hujan					46.215.000		46.215.000		46.215.000		46.215.000	46.215.000
				Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum												
				Upah PHL			4.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000		4.095.000.000	4.095.000.000
				Belanja Tagihan Listrik												
				Tagihan Listrik Krematorium			106.024.105		108.000.000		108.000.000		108.000.000		108.000.000	108.000.000
				Tagihan Listrik 3 TPU			67.180.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	66.000.000
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan												
				Belanja Tagihan Internet Spesifikasi : Bulan			24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	24.000.000
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan												
				(Belanja Pajak STNK Kendaraan Bermotor Roda Dua UPTD Pemakaman)			11.620.000		11.620.000		11.620.000		11.620.000		11.620.000	11.620.000
				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			233.401.020		244.608.000		244.608.000		244.608.000		244.608.000	244.608.000
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												
				Belanja Iuran Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Bpjs kecelakaan Kerja			853.125		14.676.480		14.676.480		14.676.480		14.676.480	14.676.480
				Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN												
				Belanja Iuran Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : Bpjs jaminan Kematian PHL			1.023.750		18.345.600		18.345.600		18.345.600		18.345.600	18.345.600
				Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	15.000.000



				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Belanja Service dan Suku Cadang Kendaraan Bermotor Khusus			60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
				Peningkatan Prasarana dan sarana UPTD Pemakaman / ATK			0		98.950.000		98.950.000		98.950.000		98.950.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover											
				Peningkatan Prasarana dan sarana UPTD Pemakaman / Kertas A4 80gram					5.509.350		5.509.350		5.509.350		5.509.350
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											
				Peningkatan Prasarana dan sarana UPTD Pemakaman / Tinta Printer			0		28.080.000		28.080.000		28.080.000		28.080.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
				Peningkatan Prasarana dan sarana UPTD Pemakaman/ Lampu Emergency LED Visalux 60 LED Tipe 860L					2.688.000		2.688.000		2.688.000		2.688.000
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor											
				Peningkatan Prasarana dan sarana UPTD Pemakaman / Alat Kebersihan			0		155.018.000		153.921.000		153.921.000		153.921.000
				Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa											
				Mesin Sedot Air			0		20.790.000						
				Mesin potongrumput gendong			0		115.260.000						
				Mesin chainsaw gergaji potong kayu 20"			0		30.624.000		30.624.000		30.624.000		30.624.000
				Busi Mesin Potong Rumput					1.740.000		1.740.000		1.740.000		1.740.000
				Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran											
				Tool Set Dengan 445 Jenis Perkakas					20.010.000		20.010.000		20.010.000		20.010.000
				Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya											
				- - Komputer PC All In One (Core-i7 16G 1TB SSD 23.8 Display W11, LAN, WIFI)			0		74.841.000						
				- Printer Epson L3150			0		17.325.000						
				Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya											
				Pembuatan Pagar TPU Perwira							200.000.000		200.000.000		200.000.000
				Pembuatan Pagar TPU Padurenan					100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
				Pembuatan Pagar TPU Jatisari			0		0						
				Belanja Modal Jalan Kota											
				Belanja Modal Pembuatan Jalan TPU Perwira			150.000.000				200.000.000		200.000.000		200.000.000
				Belanja Modal Pembuatan Jalan TPU Pedurenan			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
				Belanja Modal Pembuatan Jalan TPU Jatisari			200.000.000				200.000.000		200.000.000		200.000.000
				Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor											
				Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Perbaikan Saluran TPU Perwira			150.000.000				200.000.000		200.000.000		200.000.000
				Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Perbaikan Saluran TPU Padurenan			150.000.000				200.000.000		200.000.000		200.000.000



				Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Perbaikan Saluran TPU Jatisari							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
				Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya														
				Penataan Gapura Permukiman Kumuh Tematik					100.000.000									
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur														
				Jasa Konsultan Perencanaan / Pengawasan					75.000.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000		144.000.000	
				Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi														
				Pembuatan Turap TPU Jatisari			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya														
				efisiensi; Spek : efisiensi (26,570 Lembar)					26,570									
3	Sasaran : Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Tujuan : :"Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan		Indeks Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		50,95%		58,52%		62,69%		66,16%		69,24%		71,88%		
							81.237.089.551		82.025.183.383		83.123.591.909		65.304.041.937		68.647.608.884		74.139.417.595	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
				Outcome: Meningkatnya kualitas gedung pendidikan	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	44,69	52,09	81.237.089.551	60,00	82.025.183.383	65,50	83.123.591.909	70,35	65.304.041.937	75,00	68.647.608.884	80,35	74.139.417.595
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas														
				Rehabilitasi Berat SDN Aren Jaya VIII			3.009											
				Rehabilitasi Total SDN Jatisari II			2.885											
				Rehabilitasi Total SDN Bintara Jaya V			2.755											
				Rehabilitasi Total SDN Jatibening III			1.924											
				Rehabilitasi Total SDN Kota Baru IX			1.395											
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatirangga I			1.894											
				Rehabilitasi Total SDN Jatirahayu VI			1.608											
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiranggon II			459											
				Rehabilitasi Ruang Kelas dan Penataan Halaman SDN Mustikasari II			2.735											
				Rehabilitasi Berat SDN Jatisari III			481											
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Perwira VII			1.966											
				Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya XVII			1.904											
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Jakasetia IV			2.341											
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatirangga II			1.570											
				Rehabilitasi SDN Aren Jaya XVIII			2.182											
				Rehabilitasi SDN Margahayu XIX			798											
				Rehabilitasi Total SDN Pengasinan IV			1.936											
				Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya IV														
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II					1.041									
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Rawalumbu VI					1.243									
				Rehabilitasi Sedang SDN Jatiasih I					1.087									
				Rehabilitasi Total SDN Jatikramat I					1.977									



				Rehabilitasi Sedang/Barat SDN Jatikramat VIII					551								
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Jatiluhur IV													
				Rehabilitasi Sedang SDN Bintara VI					664								
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji I					1.017								
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji V					1.553								
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening IV					791								
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening V					595								
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bekasi Jaya III					786								
				Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya VIII													
				Penataan Halaman SDN Bojong Menteng II													
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Menteng IV													
				Rehabilitasi Gedung SDN Pejuang I						4 RK 2 lantai	2.405						
				Rehabilitasi Gedung SDN Jatisampurna X						4 RK 2 lantai	2.405						
				Rehabilitasi Gedung SDN Aren Jaya XII						rehab bangunan luas 328.05 m2	1.968						
				Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejuang VIII						8 RK 2 lantai	3.830						
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru													
				Rehabilitasi SDN Cikiwul II Kota Bekasi			2.317										
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SDN Bantargebang VI Kota Bekasi			285										
				Penambahan Ruang Kelas SDN Cikiwul I Kota Bekasi			2.317										
				Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bantargebang V Kota Bekasi			2.748										
				Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bantargebang IV Kota Bekasi			2.748										
				Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bantargebang III Kota Bekasi			2.748										
				Rehabilitasi SDN Ciketing Udik III Kota Bekasi			1.963										
				Pembangunan SDN Kayuringin Jaya VII			676										
				Pembangunan Gedung SDN Kayuringin XIII			2.986										
				Lanjutan pembangunan SDN Duren Jaya II			1.028			2 RKB 2 lantai	2.405						
				Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru VII			245										
				Pembangunan Gedung SDN Margamulya I			2.961										
				Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kaliabang Tengah III			1.832										
				Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Halaman SDN Harapan Mulya I			25										
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya IV			85										
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung SDN Kaliabang Tengah I			85										
				Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan SDN Jatikramat VI			85										
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung SDN Harapan Mulya II			85										
				Jasa Konsultansi Perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Sepanjang Jaya III			95										



				Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Kalibaru I														
				Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Mulya I				259										
				Pembangunan Gedung SDN Cimuning V														
				Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya IV			4 RKB	2.083										
				Pembangunan Gedung SDN Kaliabang Tengah I				294										
				Lanjutan Pembangunan SDN Jatikramat VI				1.412										
				Pembangunan Gedung SDN Harapan Mulya II				1.101										
				Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Sepanjang Jaya III				2.408										
				Pembangunan SDN Aren Jaya IV														
				Pembangunan SDN Pejuang V														
				Rehabilitasi Total SDN Jaticempaka IV														
				Rehabilitasi Total SDN Jatimekar VIII						3.935								
				Lanjutan Pembangunan SDN Duren Jaya II						2.405								
				Pembangunan SDN Pekayon Jaya VIII				6 RKB 2 lantai		3.341								
				Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya IV						2.080								
				Pembangunan Gedung SDN Padurenan III				4 RK 2 lantai		2.405								
			Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
				Rehabilitasi Pagar, Penataan Halaman dan Pembangunan Gapura SDN Harapan Jaya III			558											
				Belanja Modal Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah			700											
				Penataan Halaman SDN Mustika Jaya VI			228											
				Perbaikan Lapangan Sekolah SDN Duren Jaya VII			100											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Total Gedung SDN Bintara Jaya II			70											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bojong Rawalumbu VI			70											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang SDN Jatiasih I			70											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Total SDN Jatikramat I			75											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatikramat VIII			45											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang SDN Bintara VI			48											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji I			70											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kranji V			75											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening IV			45											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatibening V			45											
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Bekasi Jaya III			53											
				Penataan Halaman SDN Harapan Mulya I				300										



				Penataan Halaman SDN Harapan Mulya II					300								
				Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya IV					559								
				Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Harapan Jaya V					360								
				Penataan Halaman, SDN Harapan Jaya IX, XVI, XVII					294								
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah I					294								
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah II					422								
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah IV					220								
				Penataan Halaman SDN Kaliabang Tengah VI					294								
				Penataan Halaman SDN Harapan Baru III dan V					566								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Jatiasih IV					200								
				Penataan Halaman SDN Jatiluhur III					185								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Aren Jaya VI					200								
				Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya VIII					357								
				Pembangunan Musholla SDN Bekasi Jaya V					150								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Margahayu II					200								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Margahayu V					200								
				Renovasi Pagar dan Gapura SDN Margahayu XIX					150								
				Penataan Halaman SDN Pejuang I, III					200								
				Penataan Halaman SDN Pedurenan IV					631								
				Penataan dan Pemagaran SDN Mustikasari I					817								
				Penataan Halaman SDN Mustika Jaya II					428								
				Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Jatirangga III				halaman 491,69 m2 pagar 133,25 m	606								
				Penataan Halaman SDN Jatisampurna III					300								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Jatisampurna VIII					200								
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas SDN Jatisampurna IX					200								
				Penataan Halaman SDN Jakasetia IV													
				Rehabilitasi Pagar Gedung SDN Pejuang VII Kota Bekasi				pagar samping 150m	441								
				Rehabilitasi SDN Pekayon Jaya VIII													
				Penataan Halaman SDN Marga Jaya I													
				Rehabilitasi Ringan SDN Jatibening Baru VI							penggantian atap dan langit-langit	531					
			Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
				Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SDN Jatiasih IV			933										
				Pembangunan Ruang Kantor SDN Bekasi Jaya XI					1.102								



				Pembangunan Ruang Guru dan WC SDN Aren Jaya X dan XIV														
				Pembangunan Ruang Guru SDN Jatirahayu III				621										
				Lanjutan Pembangunan Sanggar Pendidikan SKB Kota Bekasi														
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
			Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru															
				Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Atap Gedung SMPN 27 Kota Bekasi			2.700											
				Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Penataan Pagar SMP Negeri 55 Kota Bekasi			847											
				Pembangunan Gedung SMPN 24 Kota Bekasi				2.644										
				Pembangunan Gedung SMPN 25 Kota Bekasi				5.289										
				Pembangunan Gedung SMPN 27 Kota Bekasi														
				Pembangunan Gedung SMPN 29 Kota Bekasi				2.644										
				Pembangunan Gedung SMP Negeri 30 Kota Bekasi				3.085										
				Pembangunan SD dan SMP Terpadu														
				Pembangunan SMAN 21														
			Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
				Pembangunan Gedung SMPN 61 Kota Bekasi						21.001								
				Pembangunan Gedung SMPN 62 Kota Bekasi						9.444								
				Pembangunan USB SMP di Kelurahan Margahayu														
				Pembangunan Gedung SMPN 52 Kota Bekasi														
				Pembangunan Gedung SMPN 57 Kota Bekasi				10.000										
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
				Rehabilitasi Gedung SMPN 13 Kota Bekasi			359											
				Rehabilitasi Gedung SMPN 15 Kota Bekasi			3.326											
				Rehabilitasi Gedung SMPN 18 Kota Bekasi						rehab total 2 RK, 2 lantai	1.176							
				Rehabilitasi Total Gedung SMPN 12 Kota Bekasi			3.589											
				Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 16 Kota Bekasi						- Bangunan baru 9 RKB 3 lantai - Menyelesaikan 2025 ada 2 RKB - Halaman 310 m2	7.000							
				Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 19 Kota Bekasi			4.578											
				Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 44 Kota Bekasi			3.084											
				Rehabilitasi Total SMPN 32 Kota Bekasi			6.708											
				Rehabilitasi Gedung SMPN 8 Kota Bekasi			1.594											
				Rehabilitasi Gedung SMPN 11 Kota Bekasi			2.460											
				Rehabilitasi SMPN 58 Kota Bekasi			228			pagar keliling 386 m, halaman 984 m2	1.519							
				Rehabilitasi SMPN 60 Kota Bekasi			550											
				Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Kota Bekasi							5.967							



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				Penataan Halaman, pemagaran dan pemasangan IPAL Puskesmas Kalibaru							600						
				Penataan Halaman dan Pemagaran Puskesmas Duren Jaya							500						
				Lanjutan Pembangunan Puskesmas Sepanjang Jaya													
			Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
				Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Jatisampurna (Tunda Bayar)			3.409										
				Lanjutan Pembangunan RSUD Jatisampurna			1.400										
				Rehabilitasi Gedung RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid			2.500										
				Pembangunan Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal dan Parkir RSUD Dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi Kota Bekasi							105.000						
			Sub Kegiatan Pembangunan Kesehatan Lainnya														
				Perbaikan Labkesda Kota Bekasi			900										
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				187.379.223.487		144.559.827.120		153.734.997.730		154.129.333.600		162.020.755.480		170.121.793.254
			Outcome: Meningkatnya kualitas bangunan gedung (updet perkimtan)	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	35,71	40,6	187.379.223.487	50,89	124.559.827.120	63,89	145.734.997.730	68,56	154.129.333.600	71,5	162.020.755.480	73	170.121.793.254
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Persetujuan bangunan gedung (PBG) dan														
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
				Pembangunan Kantor Kecamatan Bantargebang			9.337										
				Renovasi Gedung Kantor Kecamatan Pondok Melati			3.811										
				Pembangunan Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya			559										
				Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Padurenan			741										
				Perbaikan/Renovasi Kantor Kelurahan Mustikasari			1.341										
				Pembangunan Rumah Dinas Wakil Walikota			6.613										
				Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Pondokgede			1.591										
				Rehabilitasi Aula Kantor Kelurahan Duren Jaya			949										
				Pembangunan Gedung Kantor PDAM			4.615										
				Rehabilitasi Aula Kelurahan Teluk Pucung			1.811										
				Rehabilitasi Kantor Pemerintahan Kota Bekasi			1.066										
				Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimurni			1.811										
				Lanjutan Pembangunan Gedung PWRI			868										
				Perluasan Gedung Record Centre pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi			841										
				Rehabilitasi Aula Kelurahan Harapan Jaya			841										
				Pembangunan Pendopo Kantor Kelurahan Pengasinan			173										
				Pemagaran Kantor Kelurahan Jatisari			79										
				Pembangunan Gapura Kantor Kelurahan Jatiranggon			79										
				Rehabilitasi Total Gedung Pendopo Kantor Kecamatan Bekasi Selatan			972										
				Rehabilitasi Total Kantor Kecamatan Mustikajaya			5.592										



				Lanjutan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA			24.679											
				Rehabilitasi Total Gedung Kantor Kelurahan Jatisari			3.760											
				Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Jatiwarna			4.412											
				Lanjutan pembangunan GOR Terpadu			65.162											
				Pembangunan Gedung Basket Kota Bekasi			17.678											
				Lanjutan Pembangunan Lintasan Sepatu Roda			11.655											
				Pemagaran Kantor Kelurahan Kotabaru			228											
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung PPD1						halaman 724 m2, pekerjaan non standar								
										791								
				Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Kalibaru			176											
				penataan halaman kantor sekretariat bersama kota bekasi			636											
				Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kompleks Kejaksaan			2.000											
				Pembangunan Rumah Singgah			400											
				Rehabilitasi Musholla dan Aula di KODIM			240											
				Perbaikan Lapangan Tennis PMI			200											
				Pemeliharaan Gedung Parkir Stadion			500											
				Pembangunan Lapangan Voley Pasir			2.358											
				Penataan Halaman Kantor Kecamatan Jatisih														
				Rehabilitasi Aula Gedung Kantor Kecamatan Jatisampurna														
				Pembangunan Balai Patriot					26.260									
				Rehabilitasi Gedung Perpustakaan					5.883									
				Pembangunan Gedung Polsek Bekasi Timur					2.000									
				Pembangunan Gedung Polsek Mustikajaya					5.000									
				Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi														
				Renovasi Mess Kodim 0507/Bekasi					1.500									
				pembangunan Kantor PCNU, MUI,DMI Kecamatan Bekasi Utara dan Rawa Lumbu					6.308									
				Rehabilitasi Kantor Subdenpom Jaya/2-1 Kota Bekasi														
				Rehab ringan dan Penataan Halaman Kantor Kelurahan Duren Jaya														
				Pembangunan Gedung PMI Kota Bekasi														
				Penataan Halaman Kantor Kelurahan Bekasi Jaya														
				Penataan Halaman Kantor Kelurahan Kranji						pagar 124,6 m		407						
				Pemagaran Kantor Kecamatan Bekasi Selatan														
				Pemagaran Kantor Kecamatan Bekasi Barat														
				Penataan Halaman Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu														
				Rehabilitasi Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi														



				Penataan Pagar Kantor Kecamatan Bekasi Timur												
				Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Bintara Jaya												
				Pembangunan / Rehabilitasi pasar wisma asri/kandang gajah kecamatan bekasi utara					12.000							
				Rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi					4.400							
				Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Jatisampurna												
				Rehabilitasi Depo Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah												
				Revitalisasi Tahap III Pasar Harapan Jaya Kota Bekasi												
				Revitalisasi Pasar Wisma Jaya Kota Bekasi												
				Rehabilitasi Total Gedung UPTD KB Kecamatan Medan Satria												
				Lanjutan Rehabilitasi Aula Kantor Kelurahan Duren Jaya												
				Pembangunan Mix Use Pasar dan Rusun di Pasar Bintara												
				Gedung Sekretariat HMI, PMII, GMII, GMKI						penggantian keramik, atap, plafond dan pengecatan	862					
				Rehabilitasi Lapangan Multi Guna												
				Pembangunan Wisma Atlit (5 Lantai)												
				Pembangunan Gedung Olahraga Bersama (5 lantai)					21.209							
				Pembangunan GOR Futsal/ Tenis Indoor/ Gedung Parkir (5 lantai)												
				Rehabilitasi Lintasan Atletik Stadion Patriot Candrabhaga					5.000							
				Pengadaan Sarna Panjat Tebing					5.000							
				Sarana pada GOR Volley dan Badminton					10.000							
				Lanjutan Pembangunan Gedung Basket					9.000							
				Penataan Kawasan GOR Bekasi					11.000							
				Pembangunan Kolam Renang Kelas Olympic Kota Bekasi												
				Lanjutan Penataan Kawasan Alun-Alun M. Hasibuan Kota Bekasi												
				Pembangunan Park n Ride Alun Alun Kota Bekasi												
				Pembangunan Pasar Bintara dan Rumah Susun												
				Pembangunan/Revitalisasi Tahap III Pasar Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara												
				Pembangunan/Revitalisasi Pasar Wisma Jaya Kecamatan Bekasi Timur												
				Rehabilitasi Total Gedung LPM BKM di Kelurahan Aren Jaya						rehab total bangunan 2 lt, luas 204 m2, halaman 600 m2	1.650					
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota													
				Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Polsek Bekasi Timur				95								
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi				162								



				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Depo Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah				200									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Olahraga Bersama (5 lantai)				385									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lintasan Atletik				210									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Sarna Panjat Tebing				211									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Penataan Kawasan GOR Bekasi				366									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kantor ICNU, MUI DMI Kec Bekasi Utara dan Rawa Lumbu				170									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan /Rehabilitasi Pasar Wisma Asri/Kandang Gajah Kec Bekasi Utara				476									
				Belanja Jasa Konsultansi FS/Pradesain Pembangunan Pasar Bintara dan Rumah Susun				100									
				Belanja Jasa Konsultansi FS/Pradesain Pembangunan Park n Ride Alun-Alun Kota Bekasi				100									
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana pada GOR Volley dan Badminton				365									
				Belanja Jasa Konsultansi DED lapangan multiguna				350									
4	Sasaran: Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Tujuan : Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan															
		Sasaran IV : Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum															
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100	100.000.000	100	105.180.000	100	111.238.368	100	116.933.772	100	123.201.423
			Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	0	100	0	100	100.000.000	100	105.180.000	100	111.238.368	100	116.933.772	100	123.201.423
			Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Penyelesaian sengketa tanah garapan													
			Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) tahun Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	100.000.000	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-		1.490.000		1.490.000		1.490.000		1.490.000	1.490.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-		36.480.000		36.480.000		36.480.000		36.480.000	36.480.000	
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-		12.350.000		12.350.000		12.350.000		12.350.000	12.350.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-		15.480.000		15.480.000		15.480.000		15.480.000	15.480.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-		34.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000	34.200.000	



			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				231.371.969.886		170.591.744.743		185.233.844.743		173.920.047.000		179.137.648.410		195.260.036.767
			Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	33	36,76	231.371.969.886	43,2	170.591.744.743	50,34	185.233.844.743	55,65	173.920.047.000	61,85	179.137.648.410	65,7	195.260.036.767
			Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota													
			Subkegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		23 Dokumen	265.788.079.886	13 Dokumen	147.900.000								
				Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan SDN Jatibening Baru 2 Kecamatan Pondok Gede			100.055		154.600								
				Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan SDN Jatisampurna 2 Kecamatan Jati Sampurna			17.000		100.000								
				(isi nama pekerjaan)													
				Lanjutan Pengadaan Lahan Flyover Bulak Kapal		1835 M	24.975.650.000										
				Pengadaan Lahan TPA Sumur Batu		3721 M	14.981.660.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan Simpang se-Kota Bekasi		587 M	8.931.300.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan TPU Padurenan		1033 M	2.593.450.000										
				Pengadaan Lahan SMPN 45 Kota Bekasi		1580 M	5.482.090.000										
				Pengadaan Lahan SMPN Negeri 57 kota bekasi		2610 M	12.982.030.000										
				Pengadaan Lahan Sarana RW Jatisari		226 M	700.000.000										
				Pengadaan Lahan TPU Bekasi Utara		2639 M	7.993.450.000										
				Pengadaan Lahan TPU Jatisari		1292 M	3.442.546.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan Saluran Inlet Polder Jatimelati		991 M	3.999.250.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan Polder 202		2425 M	10.992.030.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan Polder Kranji		3314 M	14.994.320.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan Flyover Bulak Kapal		1769 M	24.224.744.257										
				Pembebasan Lahan Pasar PSEL		1 Paket	35.000.000.000										
				Lanjutan Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat Batu Kecamatan Bantargebang		1 Paket	15.000.000.000										
				Pembebasan Tanah Untuk polder Rawa Lumbu		2.476	10.000.000.000										
				Kegiatan Lanjutan Tahap III Pengadaan Lahan Sekolah Di Sumur Batu Kecamatan Bantargebang		4.000	10.216.809.000										
				Kegiatan Lanjutan Pengadaan Lahan TPA Sumur Batu		7.508	22.691.744.743										
				Pengadaan Lahan Untuk PSEL		1 M	17.396.557.616										
				Kegiatan lanjutan pengadaan lahan pelebaran jalan pangkalan 2 (LUNCURAN 2021)		1 M	655.532.409										
				Fly Over Cipendawa		Paket	230.000.000										



				Kegiatan lanjutan pengadaan lahan pelebaran jalan pangkalan 2 (LUNCURAN 2022)	1 Paket	2.866.857.455										
				Kegiatan lanjutan pengadaan lahan pelebaran jalan pangkalan 2 (LUNCURAN 2022)	1 Paket	356.588.663										
				Kegiatan Lanjutan Tahap IV Pengadaan Lahan Sekolah Di Sumur Batu Kecamatan Bantargebang	1 Paket	15.000.000.000										
				Pendataan, Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah			1 Paket	100.000.000								
				Pengadaan Lahan Sarana RW 012 Kel. Jakamulya			1 Paket	250.000.000								
				Pengadaan Lahan Sarana RW 01 Kel. Jakamulya			1 Paket	250.000.000								
				Pengadaan Lahan PLTSA			1 Paket	20.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Untuk Penataan Simpang se-Kota Bekasi			1 Paket	10.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Lanjutan Pembangunan Fly Over Bulak Kapal Kec. Bekasi Timur			1 Paket	50.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Polder se-Kota Bekasi Rawalumbu			1 Paket	35.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Kali Lengka			1 Paket	5.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Polder Jatikramat			1 Paket	5.000.000.000								
				KEGIATAN PENGADAAN LAHAN TPU PERWIRA			1 Paket	10.000.000.000								
				Lanjutan Pembebasan Lahan Crossing BSK			1 Paket	5.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Land Saving			1 Paket	7.000.000.000								
				Pengadaan Lahan Kantor Sekretariat RW.001 Kelurahan Ciketing Udik Kota Bekasi			1 Paket	300.000.000								

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025

Keterangan

Program
Outcome
Kegiatan
Subkegiatan



4.2 PROGRAM PRIORITAS DISPERKIMTAN

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 beserta pagu indikatif (merupakan sigma pagu subkegiatan yang paling dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Program Prioritas Dan Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Program Prioritas Disperkintan	Indikator	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	25.877.444.600	16.735.330.800	16.915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1,110,000,000	400,000,000	400,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100,000,000	242,450,993	309,057,275	415,681,989	438,043,571
		3,360,019,173	2,750,019,173	2,892,470,166	3,059,076,448	3,215,701,162	3,288,062,744
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan"	16,876,000,000	20,399,427,578	21,456,117,927	22,691,990,319	23,853,820,223	25,132,384,987
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/ dipugar di kawasan perkotaan	3.223.350.640	1.387.620.800	1.459.499.557	1.543.566.732	1.622.597.349	1.709.568.567
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	7,458,850,000	4,667,650,000	23,468,494,212	24,972,279,479	26,326,060,188	27,916,337,014
	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	14,000,000,000	41,160,068,399	20,000,000,000	21,000,000,000	22,000,000,000	23,000,000,000
		21,458,850,000	45,827,718,399	43,468,494,212	45,972,279,479	48,326,060,188	50,916,337,014
Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	80.780.028.878	66.882.239.600	70.346.739.611	74.398.711.813	78.207.925.858	79.772.084.375



Program Prioritas Disperkintan	Indikator	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	25.877.444.600	16.735.330.800	16.915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	81.237.089.551	82.025.183.383	83.123.591.909	65.304.041.937	68.647.608.884	74.139.417.595
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	2.328.465.232	7.500.000.000	7.888.500.000	8.342.877.600	8.770.032.933	9.240.106.698

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Kota Bekasi Dan Disperkintan Tahun 2025

4.2.1 Program Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi, sehingga dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya untuk berkontribusi terhadap penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penanggulangan dan pengentasan kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Lebih jelasnya mengenai Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang mendukung penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;



			• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan"	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	• Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; • Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ; • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya kualitas gedung pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar:	• Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas • Pembangunan ruang kelas baru • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah • Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU



		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	• Pembangunan Ruang Kelas Baru • Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) • Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas gedung kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	• Pembangunan Puskesmas • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas • Pengembangan Puskesmas • Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya • Pembangunan Kesehatan Lainnya

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025

4.2.2 Sub Kegiatan Yang Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Program prioritas lainnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, sehingga dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya untuk berkontribusi terhadap Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting melalui pencapaian akses Akses terhadap Air Minum Aman dan Akses terhadap Sanitasi Aman dimana sub kegiatan yang Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kota Bekasi Tahun 2025-2029. lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Sub Kegiatan
Rumah tangga masyarakat	Akses terhadap Air Minum Aman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Sub Kegiatan
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Masyarakat	Akses terhadap Sanitasi Aman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu



Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Sub Kegiatan
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025

4.3 PROGRAM DUKUNGAN DISPERKIMTAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA

Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Disperkimtan juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Disperkimtan terhadap pencapaian Jabar Istimewa yaitu yang terkait dengan pencapai:

1. Langkah kahiji: Infrastruktur Istimewa (Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi);
2. Langkah katuju: Lingkungan Hidup Istimewa (Mengembalikan Kondisi Lingkungan)

Kontribusi Disperkimtan terhadap pencapaian Jabar Istimewa dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

4.4 PROGRAM DUKUNGAN DISPERKIMTAN TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Disperkimtan akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029 Kontribusi Disperkimtan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita yang meliputi:

1. Kegiatan Prioritas Utama /Program Nasional (PN 2) yang meliputi:
 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hili



- Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS;
2. Proyek Strategis Nasional yaitu Pembangunan 3 juta Rumah
- Lebih jelasnya Kontribusi Disperkimtan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita dapat di lihat pada tabel 4.8.



Tabel 4.7
Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian JABAR Istimewa

Jabar Istimewa	Program	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Langkah kahiji: Infrastruktur Istimewa (Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi)	Program Pengelolaan dan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877.444.600	16.735.330.800	16..915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380
	Program Pengembangan Perumahan	3,360,019,173	2,750,019,173	2,892,470,166	3,059,076,448	3,215,701,162	3,288,062,744
	Program Kawasan Permukiman	16.876. 000.000	20.399. 427.578	21.456. 117.927	22.691. 990.319	23.853. 820.223	25.132. 384.987
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.223. 350.640	1.387. 620.800	1.459. 499.557	1.543. 566.732	1.622. 597.349	1.709. 568.567
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80.780. 028.878	66.882. 239.600	70.346. 739.611	74.398.711.813	78.207.925.858	79.772.084.375
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21,458,850,000	45,827,718,399	43,468,494,212	45,972,279,479	48,326,060,188	50,916,337,014
Langkah katuju: Lingkungan Hidup Istimewa (Mengembalikan Kondisi Lingkungan)	Program Penataan Bangunan Gedung	187.379.223.487	124.559.827.120	145.734.997.730	154.129.333.600	162.020.755.480	170.121.793.254
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.223. 350.640	1.387. 620.800	1.459. 499.557	1.543. 566.732	1.622. 597.349	1.709. 568.567

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025



Tabel 4.8
Program Dukungan Disperkintan Terhadap Pencapaian Asta Cita

Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional	Program	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kegiatan Prioritas Utama (PN.2)								
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877.444.600	16.735.330.800	16..915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380	
Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.458.850.00	45.827.719.399	43.468.494.212	45.972.279.479	48.326.060.188	50.916.337.014	
Proyek Strategis Nasional								
Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	3.360. 019.173	2.750. 019.173	2.892. 470.166	3.059. 076.448	3.215. 701.162	3.288. 062.744	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025



4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

IKU adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*).

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus menganut prinsip SMART, memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Specific (Spesifik):

Tujuan harus jelas dan terperinci. Hindari tujuan yang ambigu atau terlalu umum.

2. Measurable (Terukur):

Tujuan harus dapat diukur sehingga kemajuan dapat dilacak. Gunakan angka, persentase, atau indikator lain yang jelas untuk mengukur pencapaian.

3. Achievable (Dapat Dicapai):

Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Tujuan yang terlalu ambisius bisa menjadi kontraproduktif.

4. Relevant (Relevan):

Tujuan harus selaras dengan tujuan yang lebih besar dan memberikan manfaat nyata. Pastikan tujuan tersebut relevan dengan konteks dan kebutuhan yang ada.

5. Time-bound (Batas Waktu):

Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Dengan adanya tenggat waktu, akan lebih mudah untuk memantau kemajuan dan memastikan tujuan tercapai tepat waktu.

Dalam Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan dampak nyata dari intervensi kebijakan. Untuk lebih jelasnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 4.8.



Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99,31	99,58	99,63	99,74	99,80	99,89	100
Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	1,8	2	2,5	5	5	5	5
Persentas warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di kawasan perkotaan	16,03	21,84	37,47	53,10	68,74	84,37	100
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	1,64	3,28	4,92	6,56	8,2	9,84	11,48
Presentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum	23	25,26	25,78	28,5	30,03	32,52	34,78
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	43,75	47,26	50,78	54,98	59,18	63,38	67,58
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	35,71	40,6	50,89	63,89	68,56	71,5	73
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,69	52,09	60	65,5	70,35	75	80,35
Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	23,21	25,54	58,5	60,35	64	66,76	70
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	33	36,76	43,20	50,34	55,65	61,85	65,70
Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat	0	100	100	100	100	100	100



Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
yang dilakukan Melalui Mediasi							

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi,

4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKK)

IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99,31	99,58	99,63	99,74	99,80	99,89	100
Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	1,8	2	3,5	5	5	5	5
Persentas warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan	16,03	21,84	37,47	53,10	68,74	84,37	100
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	1,64	3,28	4,92	6,56	8,2	9,84	11,48
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	23,34	28,25	31,66	35,45	39,06	42,55	46,25



Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	43,75	47,26	50,78	54,98	59,18	63,38	67,58
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	35,71	40,6	50,89	63,89	68,56	71,5	73
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,69	52,09	60	65,5	70,35	75	80,35
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	23,21	25,54	58,5	60,35	64	66,76	70
Persentase Terelesaikannya Kasus Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	33	36,76	43,20	50,34	55,65	61,85	65,70

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi,



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah. Untuk itu sebagai salah satu perangkat daerah rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) Tahun di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi. Indikator dan target yang ditetapkan dalam restra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kota Bekasi 2025-2029 dapat terwujud. Harapan kami semoga Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Rencana Strategis yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi. Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang hendak dicapai pada periode 2025-2030. Renstra merupakan dasar dan acuan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Dinas Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman, Laporan Tahunan; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Serta keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Kesimpulan Penting

- a. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2030 merupakan pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



- b. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, khususnya di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan spesifiknya mencakup perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan, serta menyediakan dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan dan menjadi tolok ukur kinerja untuk pengendalian dan evaluasi.

2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD yang akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bekasi;

3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

- a. Memastikan kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur;
- b. Melaksanakan sosialisasi dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan kepada seluruh pegawai, mitra, serta pemangku kepentingan pembangunan Kota Bekasi;

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diharapkan perencanaan pembangunan bidang urusan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan kami pun berharap adanya masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra ini.

Bekasi 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T.,M.T

Pembina Tk.I

NIP. 197503202002121006